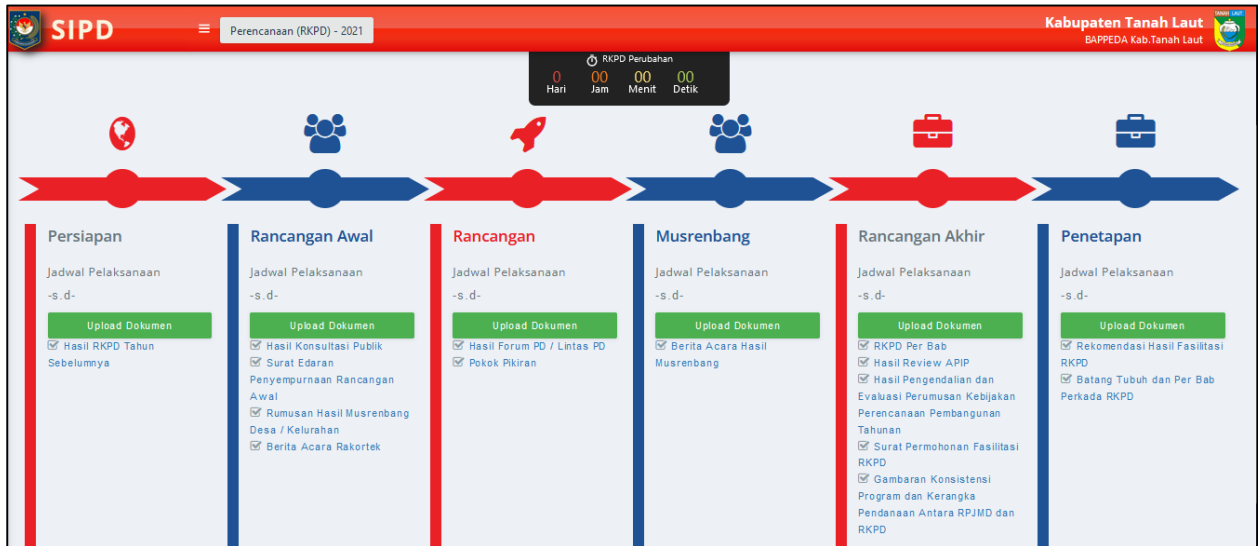


Informasi ringkasan RKP

1. Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2021



2. Tema RKP 2021

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Pemanjangan Kebijakan BERINTERAKSI dalam Membina Desa dan Menata Kota

3. Prioritas RKP 2021

- Pembangunan Sumber Daya manusia (SDM)
- Pengurangan Kemiskinan dan Transformasi Ekonomi
- Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas
- Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan

4. Isu strategis RKP 2021

- Perlunya SDM yang berkualitas
- Angka kemiskinan yang meningkat
- Kontribusi sektor pertambangan yang mulai menurun
- Pelayanan infrastruktur yang berkualitas
- Perlunya tata kelola birokrasi dan pelayanan public yang efektif dan efisien
- Pemulihan pandemic covid-19

5. Target Indikator Makro Tahun 2021

Indikator	Satuan	Realisasi 2019			Target 2021		
		Nasional	Kalsel	Tanah Laut	Nasional	Kalsel	Tanah Laut
Indeks Pembangunan Manusia	nilai	71.92	70.72	69.04	72.78 - 72.95	71,27	69.59
Pertumbuhan ekonomi	%	5.02	4.08	3,76	4.5 - 5.5	3.5 - 4.03	3.50
Angka kemiskinan	%	9.22	4.47	4.51	9.2 - 9.7	5.4	4.60
Gini Ratio	nilai	0.38	0.334	0.224	0.377 - 0.379	0.33	0.220
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.28	4.31	3.41	7.7 - 9.1	5.06	4.00

Sumber : Rancangan RKP 2021, Rancangan RKPD Kalsel 2021 dan Rancangan RKPD Kab. Tanah Laut 2021

6. Proyeksi anggaran pembangunan daerah

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
	Pendapatan Daerah	1,315,711,600,000,000,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	143.155.130.000,00
	Pajak Daerah	31.127.750.000,00
	Retribusi Daerah	7.548.980.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	94.478.400.000,000
	BLUD dan JKN	0,00
1.2	Pendapatan Transfer	1,172,556,470,000,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,067,556,470,000,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan- Dana Transfer Umum	919.594.570.000,00
	Dana Bagi Hasil	352.494.270.000,00
	Dana Alokasi Umum	567.100.300.000,00
	• DAU Formula	558.663.764.000,00
	• DAU Bantuan Pendanaan Keurahan	1.830.000.000,00
	• DAU Pendanaan Penggajian PPPK	6.606.536.000,00
1.2.1.2	Dana Perimbangan- Dana Transfer Khusus	0,00
	Dana Alokasi Khusus	0,00
1.2.1.5	Dana Desa	111.509.100.000,00
	Dana Desa	111.509.100.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar – Daerah	105.000.000.000,00
	Pendapatan Bagi hasil	105.000.000.000,00
1.2.3	Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00
	Hibah	0,00
	• Hibah Dana BOS Regular	36,452,800,000,00

Sumber :Badan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2020

Informasi ringkasan RKPD

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	Uraian	Anggaran (Rp)
2	BELANJA DAERAH	
2.1	Belanja Operasi	1,230,609,111,605.49
	Belanja Pegawai	794.350.585.291.49
	• Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Pegawai	438.697.511.687,90
	• Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	30.779.062.987,00
	• Belanja Tambahan Penghasilan	300.000.000.000,00
	• Belanja Pegawai Pendanaan Kelurahan dari APBD dan APBN, Belanja Pegawai BLUD, honorarium Tim dll	19.669.487.316,59
	• Belanja Pegawai Dana Bos	5.204.523.300,00
	Belanja Barang dan jasa	399.793.827.764,00
	• Belanja Barang dan jasa BLUD, BOS	27.787.173.864,00
	• Belanja Gaji PTT, Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
	• Belanja Barang dan jasa Bantuan Pendanaan Kelurahan dari APBN dan APBD	
	• Belanja Barang dan jasa	
	Belanja Hibah	26.464.698.550,00
	• Belanja Hibah 11 Kecamatan	11.000.000.000,00
	• Belanja Hibah Kepada Parpol	1.464.698.550,00
	• Belanja Hibah Lainnya	14.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000.000,00
	• Belanja Bansos Terencana dan Tidak Terencana	
	• Belanja Bansos Lainnya	
2.2	Belanja Modal	206,234,253,586
	Belanja Modal	202.773.150.750,00
	• Belanja Modal Dana BOS	3.461.102.836,00
	• Belanja Modal Bantuan Pendanaan Kelurahan dari APBN dan APBD	
	• Belanja Modal Lainnya	
2.3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
2.4.	Belanja Transfer	254.661.124.250,00
	Belanja Bagi Hasil	3.816.266.200,00
	• Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Pemdes	3.014.850.298,00
	• Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Pemdes	801.415.902,00
	Belanja Bantuan Keuangan	250.844.858.050,00
	• Belanja Bantuan Keuangan ADD kepada Pemdes	250.844.858.050,00
	• Belanja Bantuan Keuangan kepada Parpol	0,00
	Jumlah Belanja Daerah	1,701,504,489,441.49

Sumber: BPKADPemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2020

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

NO	Uraian	Anggaran (Rp)
3.	Pembiayaan Daerah	
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	
	Sisa Lebih Perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	455.792.889.441,49
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	455.792.889.441.49
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	35.000.000.000,00
	• Penyertaan Modal	
	• BPR	0,00
	• Bank Kalsel	15.000.000.000,00
	• BUMD Tala Menuntung	10.000.000.000,00
	• BUMD Baratala	10.000.000.000,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	35.000.000.000,00
	• Investasi Langsung Kepada Lembaga Bank/Non Bank	35.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	385.792.889.441,49
	SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	0,00

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, 2020

Informasi ringkasan RKPD

7. Alokasi anggaran perurusan

Kode	Bidang	SKPD	Progran	Kegiatan	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi	Rincian
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1	4	11	74	0	0	3.91152E+11	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	24	5	21	103	0	0	3.07946E+11	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAA	4	10	18	83	0	0	1.11087E+11	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PER	1	1	1	2	0	0	7861577077	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	2	4	10	40	0	0	20759411633	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1	6	12	48	0	0	13289417900	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2	5	14	42	0	0	12513003674	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DA	3	4	4	4	0	0	1158901590	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1	5	9	37	0	0	8404600782	
2.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	3	3	4	0	0	260000000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2	9	14	41	0	0	26684835218	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN D	1	4	7	32	0	0	7830982332	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DA	2	5	8	39	0	0	15825731624	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN I	1	4	9	34	0	0	7766870024	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	3	12	34	0	0	20215076311	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	3	7	39	0	0	6892535931	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MEI	1	5	8	34	0	0	9105698054	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1	5	9	33	0	0	6829069994	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	4	11	44	0	0	18740450632	
2.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	0	0	75000000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	0	0	50000000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1	4	4	4	0	0	2588895600	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1	2	6	27	0	0	6720143418	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1	2	6	8	0	0	269982800	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	4	8	9	0	0	1025488600	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1	4	8	42	0	0	12479802259	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2	7	16	51	0	0	64176925279	
3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1	6	9	13	0	0	3209184470	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1	2	2	6	0	0	1019502900	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	1	4	14	58	0	0	77967126634	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	1	3	14	78	0	0	50491341376	
5.01	PERENCANAAN	1	5	15	42	0	0	11412827233	
5.02	KEUANGAN	2	4	10	84	0	0	3.22376E+11	
5.03	KEPEGAWAIAN	1	2	7	36	0	0	43515002294	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	1	0	0	1630490100	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	2	3	0	0	670109500	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	1	3	8	30	0	0	15360809752	
7.01	KECAMATAN	16	6	13	65	0	0	66947895571	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	6	9	30	0	0	9963809458	

Informasi ringkasan RKPD

8. Alokasi anggaran per-SKPD

Kode	Perangkat Daerah	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Akun	Standar Harga	Pagu Validasi
1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	8	15	78	0	0	3.9374E+11
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1	5	20	85	0	0	1.94956E+11
1.02.0.00.0.00.01.0001	Balai Laboratorium Kesehatan	1	2	2	10	0	0	254835962
1.02.0.00.0.00.01.0002	Instalasi Farmasi Kabupaten	1	2	2	9	0	0	315833038
1.02.0.00.0.00.01.0003	RSUD H. Boejasin	1	4	10	37	0	0	81039386428
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD K.H. Mansyur Kintap	1	3	6	34	0	0	12296057278
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Angsau	1	2	2	8	0	0	895617878
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Batakan	1	2	2	10	0	0	917659592
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Bati-Bati	1	2	2	11	0	0	2015940000
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Asam-Asam	1	2	2	13	0	0	1225377000
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Bumi Makmur	1	2	2	13	0	0	559882236
1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Jorong	1	2	2	12	0	0	845641480
1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Kait-Kait	1	2	2	9	0	0	550685108
1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kintap	1	2	2	10	0	0	1719658900
1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Padang Luas	1	2	2	10	0	0	665669840
1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Panyipatan	1	2	2	11	0	0	1015898720
1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Pelaihari	1	2	2	10	0	0	1951200266
1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Sungai Cuka	1	2	2	12	0	0	1065440544
1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Sungai Riam	1	2	2	11	0	0	447046624
1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Tajau Pecah	1	2	2	9	0	0	1134446022
1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Tambang Ulang	1	2	2	14	0	0	1229607360
1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Takisung	1	2	2	6	0	0	1028496953
1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Tanjung Habulu	1	2	2	9	0	0	526663426
1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Tirtajaya	1	2	2	15	0	0	514762000
1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Kurau	1	2	2	9	0	0	774307360
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2	13	21	84	0	0	1.09517E+11
1.03.2.10.0.00.01.0001	UPT Peralatan	1	1	2	14	0	0	1163000000
1.03.2.10.0.00.01.0002	UPT Laboratorium	1	2	3	13	0	0	587011330
1.04.2.11.2.15.04.0000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingk	3	11	16	44	0	0	42563885344
1.04.2.11.2.15.04.0001	Laboratorium Lingkungan	1	1	1	1	0	0	1133557931
1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	3	7	34	0	0	15693067072
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	2	7	19	0	0	5066344561
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1	6	12	48	0	0	13289417900
2.07.3.31.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2	7	16	48	0	0	12706506574
2.07.3.31.0.00.01.0001	Balai Latihan Kerja	1	1	1	19	0	0	826000000
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemi	2	8	13	38	0	0	8584771614
2.09.3.25.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2	9	17	46	0	0	9430089382
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	4	7	32	0	0	7830982332
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	5	8	39	0	0	15779211624
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	1	3	12	33	0	0	11064045331
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	5	9	41	0	0	7017535931
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	2	11	17	47	0	0	12314882524
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pini	1	5	9	33	0	0	6829069994
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1	4	11	44	0	0	18740450632
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2	4	12	35	0	0	6990126218
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	1	4	8	42	0	0	12479802259
3.27.0.00.0.00.04.0000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1	6	9	34	0	0	52891335054
3.27.0.00.0.00.08.0000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1	6	13	40	0	0	11285590225
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	1	4	14	58	0	0	77967126634
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	3	14	78	0	0	50491341376
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	6	17	45	0	0	12082936733
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	3	9	72	0	0	3.105E+11
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	1	2	5	40	0	0	11875622952
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Ma	2	3	8	37	0	0	45145492394
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Kabupaten	1	3	8	30	0	0	15360809752
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kantor Kecamatan Bajuin	1	6	9	29	0	0	3892536172
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kantor Kecamatan Bati-Bati	1	5	8	24	0	0	6243787441
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kantor Kecamatan Batu Ampar	1	4	6	26	0	0	4735249392
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kantor Kecamatan Bumi Makmur	1	6	8	30	0	0	4176911458
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kantor Kecamatan Jorong	1	6	8	27	0	0	5419820762
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kantor Kecamatan Kurau	1	5	10	34	0	0	5455674212
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kantor Kecamatan Takisung	1	6	8	30	0	0	5114849338
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kantor Kecamatan Tambang Ulang	1	6	8	31	0	0	4883260000
7.01.2.08.0.00.09.0000	Kantor Kecamatan Panyipatan	1	6	8	23	0	0	4366945060
7.01.2.08.1.03.08.0000	Kantor Kecamatan Pelaihari	1	6	8	26	0	0	12009839683
7.01.2.08.1.03.08.0001	Kelurahan Sarang Halang	3	5	9	32	0	0	1300000000
7.01.2.08.1.03.08.0002	Kelurahan Pabahanan	2	4	8	28	0	0	1300000000
7.01.2.08.1.03.08.0003	Kelurahan Angsau	1	3	7	26	0	0	1300000000
7.01.2.08.1.03.08.0004	Kelurahan Pelaihari	1	3	7	28	0	0	1300000000
7.01.2.08.1.03.08.0005	Kelurahan Karang Taruna	1	3	6	24	0	0	1300000000
7.01.2.13.0.00.06.0000	Kantor Kecamatan Kintap	2	6	8	26	0	0	4616542053
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	6	9	30	0	0	9963809458

9. Hasil reviu dan tindak lanjut Inspektorat



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 21167 Pelaihari

CATATANHASILREVIU

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUTTAHUNANGGARAN2021**

Inspektorat Kabupaten Tanah Laut	Disusun oleh/Tanggal	Gt. Rony Repansyah
	Diteliti oleh/Tanggal	Drs. H.A. Amirul Wafa
	Disetujui oleh/Tanggal	H. Sutrisno,S.Sos,M.Si
UraianCatatanHasilReviu**)		

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas InspekturKabupaten Tanah Laut Nomor :094/216/Insp/2020 tanggal 10 Juni 2020 untuk melaksanakan reviu atas RKPD tahun 2021,bersamainikamisampaikancatatanhasilreviusebagaiberikut:

A. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN AKHIR RKPD

Tujuan: untuk menguji bahwa rancangan akhir RKPD yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai

1. Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rancangan kerja Keputusan Bupati Tanah Laut No. 188/45.44-KUM/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021..

Informasi ringkasan RKPD

2. - Untuk Evaluasi Kinerja tahun sebelumnya menggunakan Format yang berbeda sehingga belum sepenuhnya mempedomani peraturan yang berlaku sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- Hasil Evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan sesuai dengan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun berjalan yaitu Tabel T C 19 halaman 388

Hasil Evaluasi mencakup :

- Realisasi Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
 - Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
 - Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
 - Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan.
 - Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
- Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut
3. Berita Acara Musrenbang RKPD Kabupaten Tanah Laut dibuat pada tanggal 26 Maret 2020;
 4. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan RKPD oleh Kepala Kabupaten Bappeda Tanah Laut.
 5. Hasil Pemetaan Program Kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2020.

B. PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN RANCANGAN AKHIR RKPD DENGAN RPJMD.

Tujuan: untuk menguji rumusan rancangan akhir RKPD telah berpedoman pada RPJMD

1. Analisis rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada Bab IV rancangan akhir RKPD telah sesuai dengan sasaran pada Bab V dan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah pada Bab VI yang ditetapkan dalam RPJMD

Kesimpulan : Kesimpulan : Rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD

Informasi ringkasan RKPD

dan RPJMD telah sesuai

PRIORITAS PEMBANGUNAN				
No	Prioritas Pembangunan Dalam RPJM		Prioritas Pembangunan Dalam RKPD	Kesimpulan
1	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. b. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. c. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. e. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 	1	<ul style="list-style-type: none"> a. Tata Kelola birokrasi Pemerintahan b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia c. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas d. Pengurangan kemiskinan dan transformasi Ekonomi 	<p align="center">Telah selaras</p>

Pengujian Atas Kesesuaian Rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan dan RKPD dan RPJMD

SASARAN PEMBANGUNAN

Informasi ringkasan RKP

No	Sasaran Pembangunan Dalam RPJM	Sasaran Pembangunan Dalam RKP
1	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
2	Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
3	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat	Stabilitas polhukhanknm dan transformasi pelayanan publik
		Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim
5	Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

No	Nama Program	RKP			RPJM			Perangkat daerah	Ket
		Pagu Dana	Indikator	Target Kinerja	Pagu Dana	Indikator	Target Kinerja		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12.859.026.768	Nilai IKM	3 Nilai	7.032.250.000	IKM	Baik	DPRKPLH	TIDAK SESUAI
		40.569.597.050	IKM	85 Baik	1.814.610.000	IKM	Baik	BKPSDM	TIDAK SESUAI
		8.563.264.793	IKM	3 Nilai	2.250.180.000	IKM	Baik	BAPPEDA	TIDAK SESUAI
		5.835.528.696	Nilai IKM	79	1.843.060.000	IKM	Baik	CAPIL	TIDAK SESUAI
		7.412.897.519	Nilai IKM	3 Nilai	2.423.900.000	IKM	Baik	DISHUB	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

		44.720.756.653	Nilai IKM	3 Nilai	3.331.330.000	IKM	Baik	DISTANHORBUN	TIDAK SESUAI
		12.386.974.453	IKM	0 Nilai	960.000.000	IKM	Baik	INSPEKTORAT	TIDAK SESUAI
		5.844.291.494	Indek Kepuasan Masyarakat	80,45 Baik	1.094.820.000	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	DPMPSTP	TIDAK SESUAI
		3.356.029.861	IKM	3 Baik				BPBD	TIDAK SESUAI
		7.574.276.978	IKM	3 Baik	1.174.420.000	IKM	Baik	DPMD	TIDAK SESUAI
		5.120.009.275	Nilai IKM	3 Nilai	1.332.200.000	IKM	Baik	KB	TIDAK SESUAI
		8.066.138.464	Nilai IKM	3 Nilai	1.797.900.000	IKM	Baik	Dinas Koperasi	TIDAK SESUAI
		8.514.417.888	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	0 %	-	-	-	RSUD H. BOEJASIN	TIDAK SESUAI
		8.255.512.172	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Nilai	3.779.000.000	IKM	Baik	SATPOLPP	TIDAK SESUAI
		7.518.028.556	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	75,75	4.180.000	IKM	Baik	SEKRETARIAT DPRD	TIDAK SESUAI
		6.030.820.266	IKM	100	825.000.000	IKM	100	KESBANGPOL	TIDAK SESUAI
		5.686.398.318	IKM	3 Nilai	764.650.000	IKM	Baik	DISPUSIP	TIDAK SESUAI
		133.004.438.516	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks	-	-	-	DINKES	TIDAK SESUAI
		149.360.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 persen	-	-	-	UPT PUSKES PANYIPATAN	TIDAK SESUAI
		52.454.440	Indeks kepuasan masyarakat	0 jenis	-	-	-	UPT PUSKES BATAKAN	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

		132.823.500	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks	-	-	-	UPT PUSKES TAKISUNG	TIDAK SESUAI
		61.947.500	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	-	-	UPT PUSKES KURAU	TIDAK SESUAI
		57.529.500	Persentase pelayanan adminitrasi perkantoran	0 persen	-	-	-	UPT PUSKES PADANG LUAS	TIDAK SESUAI
		147.145.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks	-	-	-	UPT PUSKES BATI-BATI	TIDAK SESUAI
		123.237.385	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	-	-	UPT PUSKES KAIT-KAIT	TIDAK SESUAI
		254.560.400	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks	-	-	-	UPT PUSKES TAMBANG ULANG	TIDAK SESUAI
		257.258.398	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	-	-	UPT PUSKES PELAIHARI	TIDAK SESUAI
		44.958.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks	-	-	-	UPT PUSKES SUNGAI RIAM	TIDAK SESUAI
		53.050.500	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks	-	-	-	UPT PUSKES TIRTA JAYA	TIDAK SESUAI
		63.525.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks	-	-	-	UPT PUSKES TANJUNG HABULU	TIDAK SESUAI
		109.846.800	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	-	-	-	UPT PUSKES TAJAU PECAH	TIDAK SESUAI
		121.803.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks	-	-	-	UPT PUSKES JORONG	TIDAK SESUAI
		139.962.500	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 indeks	-	-	-	UPT PUSKES ASAM-ASAM	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKPD

		192.942.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks	-	-	-	UPT PUSKES KINTAP	TIDAK SESUAI
		175.049.800	indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	-	-	UPT PUSKES SUNGAI CUKA	TIDAK SESUAI
		134.355.795	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks	-	-	-	UPT PUSKES ANGSAU	TIDAK SESUAI
		58.544.952	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,3 indeks	-	-	-	BALAI LAB. KESEHATAN	TIDAK SESUAI
		228.821.300	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 %	-	-	-	DINAS KESEHATAN INSTALASI	TIDAK SESUAI
		4.893.269.500	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Kategori	20.964.730.000	IKM	BAIK	DISDIK	TIDAK SESUAI
		8.909.192.185	IKM	3 Nilai	1.312.000.000	IKM	Baik	DISNAKESWAN	TIDAK SESUAI
		17.941.556.250	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai	5.657.280.000	IKM	Baik	DINAS PU	TIDAK SESUAI
		113.337.600	Jumlah pembayaran rek. air, listrik, telpon dan internet dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan mengakses berbagai informasi	0 bulan	78.750.000	IKM	Baik	UPT PERALATAN DINAS PEKERJAAN UMUM	TIDAK SESUAI
		14.123.449.950	IKM	0 Nilai	6.825.000.000	IKM	Baik	SEKRETARIAT DAERAH BAG.UMUM	TIDAK SESUAI
		45.525.746	Indeks kepuasan masyarakat; Program	0 indeks; 0	-	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	-	UPT PUSKES BUMI MAKMUR	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			Pelayanan Administrasi Perkantoran						
	58.236.400		Persentase tersedianya fasilitas pelayanan administrasi perkantoran; Indeks Kepuasan Masyarakat	0 persen; 85	64.990.000	IKM	B	UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum	TIDAK SESUAI
	510.532.500		Indeks Kepuasan Masyarakat	2 Nilai	18.000.000	IKM	SANGAT BAIK	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian UPT Balai Latihan Kerja	TIDAK SESUAI
	4.884.270.931		Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai	-	-	-	KOMINFO	TIDAK SESUAI
	5.614.193.148		Nilai IKM	1 Baik	982.550.000	IKM	Baik	DINAS SOSIAL	TIDAK SESUAI
	6.716.480.502		IKM	3 Nilai	-	-	-	DINAS KETAPANG	TIDAK SESUAI
	9.613.170.674		indeks kepuasan masyarakat	2 nilai	929.070.000	IKM	SANGAT BAIK	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	TIDAK SESUAI
	4.792.031.506		IKM	3 baik	2612.760.000	IKM	BAIK	DISPORA	TIDAK SESUAI
	8.968.828.286		IKM	3 Nilai	1.473.230.000	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	BAPENDA	TIDAK SESUAI
	41.379.675.293		IKM	1 Nilai	1750.780.000	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	BPKAD	TIDAK SESUAI
	26.927.126.994		Nilai IKM	83 Nilai	7.287.700.000	IKM	B	Sekretariat Daerah Bagian Tata Usaha dan Keuangan	TIDAK SESUAI
	6.746.584.900		IKM	1 Nilai	1.120.590.000	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	DINAS PARIWISATA	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

		2.936.624.016	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks	-	-	-	RSUD KINTAP	TIDAK SESUAI
		4.075.917.792	IKM	1 Nilai	387.010.000	IKM	BAIK	KURAU	TIDAK SESUAI
		2.995.819.472	ikm	3 nilai	476.740.000	IKM	BAIK	BAJUIN	TIDAK SESUAI
		3.911.469.486	IKM	3 Nilai	357.350.000	IKM	B	JORONG	TIDAK SESUAI
		3.518.139.392	IKM	465.220.000 jumlah jenis, orang, transaksi keu,exs emplar	465.220.000	IKM	B	BATU AMPAR	TIDAK SESUAI
		3.099.392.710	Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai	537.680.000	IKM	BAIK	PANYIPATAN	TIDAK SESUAI
		9.949.147.183	Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	572.070.000	IKM	BAIK	PELAIHARI	TIDAK SESUAI
		3.938.055.000	IKM	1 Nilai	363.070.000	IKM	BAIK	TAMBANG ULANG	TIDAK SESUAI
		4.785.198.941	IKM	88 Nilai	363.240.000	IKM	BAIK	BATI-BATI	TIDAK SESUAI
		2.819.476.758	IKM	1	472.720.000	IKM	BAIK	BUMI MAKMUR	TIDAK SESUAI
		3.204.575.253	IKM	1 nilai	518.050.000	IKM	BAIK	KINTAP	TIDAK SESUAI
		3.179.790.378	Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	403.410.000	IKM	BAIK	TAKISUNG	TIDAK SESUAI
		248.502.000	IKM	1 nilai	244.000.000	IKM	BAIK	KEL.ANGSAU	TIDAK SESUAI
		218.328.000	IKM	1 NILAI	205.600.000	IKM	B	KEL. KARANG TARUNA	TIDAK SESUAI
		197.969.300	IKM	1 Nilai	199.970.000	IKM	B	KEL. PABAHANAN	TIDAK SESUAI
		196.807.300	IKM	1 nilai	205.600.000	IKM	B	KEL. PELAIHARI	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

		260.720.000	IKM	0 NILAI	206.000.000	IKM	B	KEL. SARANG HALANG	TIDAK SESUAI
2	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	30.026.000	Nilai IKM	3 Nilai	18.150.000	-	Baik	DPRKPLH	TIDAK SESUAI
		25.000.000	IKM	85 Baik	25.000.000	IKM	Baik	BKPSDM	TIDAK SESUAI
		24.014.500	Nilai IKM	79	17.000.000	IKM	Baik	CAPIL	TIDAK SESUAI
		98.811.800	Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	82.500.000	IKM	Baik	DISTANHORBUN	TIDAK SESUAI
		27.250.000	Nilai Sakip	0 Nilai	15.750.000	IKM	Baik	INSPEKTORAT	TIDAK SESUAI
		25.000.000	Indek Kepuasan Masyarakat	80,45 Baik	21.000.000	Cakupan Ketersediaan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dalam SIPD (%)	100	DPMPSTP	TIDAK SESUAI
		20.004.700	Jumlah Pameran	3 kali	19.800.000	Jumlah Pameran	1 kali	BPBD	TIDAK SESUAI
		15.000.000	Indek Kepuasan Masyarkat (IKM)	3 Nilai	25.000.000	IKM	100	KB	TIDAK SESUAI
		27.750.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Nilai	10.500.000	IKM	Baik	SATPOL PP	TIDAK SESUAI
		425.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Kategor i	425.000.000	IKM	Baik	DISDIK	TIDAK SESUAI
		-	IKM	3 NILAI	100.000.000	IKM	Baik	DISNAKESWAN	TIDAK SESUAI
		41.265.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai	31.500.000	IKM	B	DINAS PU	TIDAK SESUAI
		25.000.000	IKM	3 Nilai	50.000.000	IKM	BAIK	DINAS KETAPANG	TIDAK SESUAI
		25.000.000	Nilai IKM	3 Nilai	-	-	-	BAPENDA	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

		24.994.700	IKM	1 Nilai	-	Cakupan Ketersediaan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Laman Resmi Perangkat Daerah (%)	100	BPKAD	TIDAK SESUAI
		23.000.000	IKM	1 pelaporan	10.500.000	Cakupan Ketersediaan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dalam SIPD (%)	100	DINAS PARIWISATA	TIDAK SESUAI
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	29.722.200	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	0 %	-	Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur	-	BKPSDM	TIDAK SESUAI
		223.850.000	FALSE	FALSE	-	-	-	BAPPEDA	TIDAK SESUAI
		221.201.900	FALSE	FALSE	-	-	-	CAPIL	TIDAK SESUAI
		431.460.000	FALSE	FALSE	-	-	-	DISTANHORBUN	TIDAK SESUAI
		328.299.800	IKM	0 Nilai	-	IKM	Baik	INSPEKTORAT	TIDAK SESUAI
		48.400.000	Indek Kepuasan Masyarakat	80,45 Baik	-	-	-	DPMPSTP	TIDAK SESUAI
		86.557.200	Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Efektif dan Efisien	0 %	-	IKM	Baik	DPMD	TIDAK SESUAI
		215.530.000	FALSE	FALSE	-	IKM	Baik	KB	TIDAK SESUAI
		459.790.000	FALSE	FALSE	-	-	-	Dinas Koperasi	TIDAK SESUAI
		580.600.000	FALSE	FALSE	-	-	-	Sekretariat DPRD	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

		251.434.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 persen	-	-	-	UPT PUSKES PANYIPATAN	TIDAK SESUAI
		101.232.000	FALSE	FALSE	-	-	-	UPT PUSKES TAJAU PECAH	TIDAK SESUAI
		6.795.000	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0 %	-	-	-	BALAI LAB. KESEHATAN	TIDAK SESUAI
		12.600.000	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas /operasional	0	-	-	-	DINAS KESEHATAN INSTALASI	TIDAK SESUAI
		816.012.400	FALSE	FALSE	1.241.800.000	IKM	BAIK	DISDIK	TIDAK SESUAI
		259.017.640	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0 %	-	-	-	DISNAKESWAN	TIDAK SESUAI
		3.380.069.950	IKM	0 Nilai	7.540.970.000	IKM	BAIK	SEKRETARIAT DAERAH BAG.UMUM	TIDAK SESUAI
		24.504.480	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0	-	-	-	UPT PUSKES BUMI MAKMUR	TIDAK SESUAI
		166.500.000	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	0 unit	-	-	-	KOMINFO	TIDAK SESUAI
		190.695.000	FALSE	FALSE	-	-	-	DINAS SOSIAL	TIDAK SESUAI
		78.500.000	FALSE	FALSE	100.000.000	IKM	BAIK	DINAS KETAPANG	TIDAK SESUAI
		86.876.300	FALSE	FALSE	-	Cakupan Ketersediaan	-	BAPENDA	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKPD

						Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana			
	316.850.000	FALSE	FALSE	-	-	-	-	DISPORA	TIDAK SESUAI
	992.800.000	FALSE	FALSE	-	-	-	-	RSUD KINTAP	TIDAK SESUAI
	38.061.000	IKM	1 Nilai	-	-	-	-	KURAU	TIDAK SESUAI
	55.220.000	IKM	jumlah pemeliharaan	-	-	-	-	BATU AMPAR	TIDAK SESUAI
	50.500.000	Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai	-	-	IKM	-	PANYIPATAN	TIDAK SESUAI
	29.153.600	FALSE	FALSE	-	-	-	-	PELAIHARI	TIDAK SESUAI
	51.906.200	FALSE	FALSE	-	-	-	-	BUMI MAKMUR	TIDAK SESUAI
	17.049.300	Indek Kepuasan Masyarakat	0 Nilai	-	-	-	-	TAKISUNG	TIDAK SESUAI
	75.165.000	Tersedianya Lemari Arsip (Kayu); Tersedianya Komputer PC dan Printer	0 %; 0 %	-	-	-	-	ANGSAU	TIDAK SESUAI
	119.259.200	Terpeliharanya Kantor Representatif untuk Bekerja	0 %	61.000.000	-	IKM	BAIK	KARANG TARUNA	TIDAK SESUAI
	12.400.000	Tercapainya pemenuhan keperluan peralatan kantor untuk kelancaran tugas	0 %	-	-	-	-	PABAHANAN	TIDAK SESUAI
	85.900.000	Persentase Peningkatan	0 %	-	-	-	-	KEL. SARANG HALANG	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			Sarana dan Prasarana Aparatur						
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	350.000.000	Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	5 Kategori	600.000.000	IKM	BB	DISDIK	TIDAK SESUAI
5	Program peningkatan disiplin Aparatur	21.000.000	FALSE	FALSE	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	TIDAK SESUAI
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	88.719.721.665	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	88,58 %	34.392.700.000	%	100	"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan"	TIDAK SESUAI
7	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	19.907.607.400	Angka Partisipasi Kasar (APK)	39 %	-	-	-	"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan"	TIDAK SESUAI
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan	351.225.000	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP; Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD; Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih PAUD	87 %; 83,22 %; 67 %	2.200.000.000	%	-	"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan"	TIDAK SESUAI
9	"Program pengadaan, peningkatan sarana dan	879.704.003	Persentase pemenuhan	0 %	-	Persentase Pengadaan	-	"Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari"	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKPD

	prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata"		kebutuhan operasional fasilitas pelayanan kesehatan			Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit			
		1.872.000.000	FALSE	FALSE	-	Indeks	-	Dinas Kesehatan RSUD Kintap	TIDAK SESUAI
10	"Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata"	320.000.000	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	0 %	-	Kepuasan Pelanggan Pada Rumah Sakit	-	"Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari"	TIDAK SESUAI
		216.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks	-	Cakupan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (%)	-	Dinas Kesehatan RSUD Kintap	TIDAK SESUAI
11	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	90.124.000	Persentase pemenuhan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	0 %	-	I-	-	"Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari"	TIDAK SESUAI
12	"Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan"	88.000.000	Persentase penurunan AKI	0 %	-	Indeks Promotif Dan Preventif (Area Managerial)	-	"Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari"	TIDAK SESUAI
		1.574.108.351	AKI	01100.0 0 Kelahir an Hidup	1.757.810.000	Kelahiran Hidup	-	Dinas Kesehatan	TIDAK SESUAI
13	"Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan"	10.176.002.750	Persentase Peserta JKN	0 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari"	TIDAK SESUAI
		40.933.740.146	Persentase Puskesmas yang terakreditasi Utama	0 %	-	Persentase Penanganan Krisis Kesehatan Dan Public Service Center (Psc)119 (Termasuk	-	Dinas Kesehatan	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

					Pelayanan On Call			
	88.668.555	Persentase Peserta JKN	0 Persen	-	Kelompok Penilaian Kinerja Puskesmas	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan"	TIDAK SESUAI
	65.950.000	Persentase peserta JKN	0 %	-	Kelompok Penilaian Kinerja Puskesmas	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung"	TIDAK SESUAI
	51.466.070	Jumlah peserta JKN	0 persen	-	Kelompok Penilaian Kinerja Puskesmas	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas"	TIDAK SESUAI
	150.357.500	Persentase Peserta JKN	0 %	-	Kelompok Penilaian Kinerja Puskesmas	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati-Bati"	TIDAK SESUAI
	51.983.362	Persentase peserta JKN; Persentase Keluarga Sehat	0 persen; 0 persen	-	Kelompok Penilaian Kinerja Puskesmas	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait-Kait"	TIDAK SESUAI
	119.547.072	Persentase Keluarga Sehat; Persentase Peserta JKN	0 persen; 0 persen	-	Kelompok Penilaian Kinerja Puskesmas	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu"	TIDAK SESUAI
	328.343.547	Persentase pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan dan jaminan kesehatan	100 %	-	Kelompok Penilaian Kinerja Puskesmas	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah"	TIDAK SESUAI
	231.521.815	Persentase Peserta JKN	0 %	-	Kelompok Penilaian Kinerja Puskesmas	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong"	TIDAK SESUAI
	94.931.625	Persentase Keluarga Sehat;	0 persen; 0 persen	-	Kelompok Penilaian Kinerja	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap"	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			Persentase Peserta JKN			Puskesmas			
		93.225.864	Persentase peserta JKN	0 %	-	Kelompok Penilaian Kinerja Puskesmas	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka"	TIDAK SESUAI
14	"Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)"	7.233.963.325	Persentase kepuasan pelanggan pada Rumah Sakit	0 %	14.965.770.000	IKM	3,3	"Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari"	TIDAK SESUAI
		21.256.590.349	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks	14.965.770.000	IKM	3,3	Dinas Kesehatan	TIDAK SESUAI
15	Program Informasi Kesehatan Medik	307.028.000	Persentase peningkatan kepuasan pelanggan pada rumah sakit	0 %	-	Cakupan Penyediaan Administrasi Rumah Sakit (%)	-	"Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari"	TIDAK SESUAI
16	Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	1.415.087.200	Cakupan Desa UCI	0 %	-	Persentase Desa/Kelurahan Mengalami Klb Penyakit Menular	100	Dinas Kesehatan	TIDAK SESUAI
17	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	50.594.192.059	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	0 %	-	Kepuasan Pelanggan Pada Rumah Sakit	-	"Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari"	TIDAK SESUAI
		829.723.453	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Takisung"	Tidak ada Program pada RPJMD
		615.104.720	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Panyipatan"	Tidak ada Program pada RPJMD

Informasi ringkasan RKPD

			pelayanan kesehatan						
		630.368.197	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan"	Tidak ada Program pada RPJMD
		653.039.860	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau"	Tidak ada Program pada RPJMD
		463.631.270	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas"	Tidak ada Program pada RPJMD
		1.638.537.500	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati-Bati"	Tidak ada Program pada RPJMD
		326.864.361	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait-Kait"	Tidak ada Program pada RPJMD
		903.696.960	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang"	Tidak ada Program pada RPJMD
		1.631.141.868	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelaihari"	Tidak ada Program pada RPJMD

Informasi ringkasan RKP

			pelayanan kesehatan						
		336.461.624	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam"	Tidak ada Program pada RPJMD
		443.961.500	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya"	Tidak ada Program pada RPJMD
		276.271.354	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu"	Tidak ada Program pada RPJMD
		595.023.675	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tajau Pecah"	Tidak ada Program pada RPJMD
		420.516.665	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong"	Tidak ada Program pada RPJMD
		1.055.664.500	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam"	Tidak ada Program pada RPJMD
		1.332.085.275	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap"	Tidak ada Program pada RPJMD

Informasi ringkasan RKP

			pelayanan kesehatan						
		690.532.480	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka"	Tidak ada Program pada RPJMD
		744.862.083	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau"	Tidak ada Program pada RPJMD
		471.352.010	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur"	Tidak ada Program pada RPJMD
		1.600.000.000	Persentase pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan kesehatan	100 %	-	-	-	Dinas Kesehatan RSUD Kintap	Tidak ada Program pada RPJMD
18	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	189.496.010	Persentase Keluarga sehat	25 %	-	Cakupan Kecukupan Laboratorium Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan (%)	-	Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan	TIDAK SESUAI
19	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	54.211.738	Persentase Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan	0 %	-	Persentase Jenis Obat Yang Memenuhi Standar Mutu Khasiat Dan Keamanan (%)	-	Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi	TIDAK SESUAI
20	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	9.000.000	Tercapainya Pembangunan Jalan dan	0	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			Jembatan di wilayah Kab. Tanah Laut						
21	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	508.994.559	Tercapainya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di wilayah Kab. Tanah Laut	0 KM	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	TIDAK SESUAI
22	Program Perencanaan, Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	57.634.077.600	Terlaksananya Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A); Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; Terlaksananya Pembangunan Irigasi, Normalisasi Sungai, Rawa, Pantai, Jalan Usaha Tani, Jembatan Pertanian dan Embung; Terlaksananya Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, Normalisasi Sungai, Rawa, Pantai, Jalan Usaha Tani,	0 Pertemuan; 0 Dokumen; 0 Paket; 0 Paket	23.226.210.000	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	93	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			Jembatan Pertanian dan Embung; Terlaksananya Rehabilitasi/Peeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)						
23	Program Keciaptakarya dan Pengaturan Jasa Konstruksi	24.850.000.000	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun; Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak; Cakupan penduduk berakses air minum sehat; Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak; Cakupan pembangunan gedung/bangunan fasilitas lainnya yang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan; Persentase rumah tangga yang memiliki	0 ; 0 persen; 0 persen; 0 persen; 0 Persen	30.000.000.000	Proporsi Populasi Yang Menggunakan Layanan Sanitasi Yang Dikelola Secara Aman, Termasuk Fasilitas Cuci Tangan Dengan Air Dan Sabun	45	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			sanitasi yang baik; Cakupan penyatuan kantorlayanan publik, SKPD Koordinasi dan Kantor Bupati						
24	Program Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	162.172.000	Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tanah Laut	19 Persen	30.000.000.000	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km / Jam	64	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	TIDAK SESUAI
25	Program Pengembangan Teknologi Konstruksi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Peralatan Laboratorium	31.763.600	Persentase Teknologi Konstruksi yang diaplikasikan dalam pembangunan	60 %	62.340.000	Persentase Teknologi Konstruksi Yang Diaplikasikan Dalam Pembangunan (%)	100	"Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum"	TIDAK SESUAI
26	Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.861.577.077	Jumlah rumah rakyat layak huni yang dibangun	35 Rumah	3.355.000.000	-	Baik	"Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup"	TIDAK SESUAI
27	Program Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tata Ruang	3.212.094.900	Persentase tingkat capaian perwujudan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik dan tertib	47 Dokumen	750.000.000	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW Kabupaten (%)	87	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	TIDAK SESUAI
28	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	875.000.000	Persentase PMKS yang menjadi mandiri	100 persen	2.030.000.000	Persentase PMKS Yang Menjadi Mandiri (%)	20	Dinas Sosial	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

29	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.364.305.000	Jumlah PMKS penerima program pelayanan rehabilitasi sosial yang tertangani	80 orang	160.000.000	Jumlah PMKS Penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Yang Tertangani	80	Dinas Sosial	TIDAK SESUAI
30	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	506.475.000	Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat pembinaan	155 orang	400.000.000	Jumlah Penyandang Cacat Dan Eks Trauma Yang Mendapat Pembinaan	155	Dinas Sosial	TIDAK SESUAI
31	Program pembinaan panti asuhan /panti jompo	3.304.800.000	Jumlah lanjut usia yang mendapat pembinaan dalam panti dan luar panti	365 orang	650.000.000	Jumlah Lanjut Usia Yang Mendapat Pembinaan Dalam Panti Dan Luar Panti	365	Dinas Sosial	TIDAK SESUAI
32	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	107.230.000	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pelayanan sosial	80 orang	160.000.000	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Mendapat Pelayanan Sosial	80	Dinas Sosial	
33	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	795.387.512	Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang tumbuh dan aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	9 lembaga	1.377.910.000	Jumlah PMKS Penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Yang Tertangani	100	Dinas Sosial	TIDAK SESUAI
34	Program Pembinaan, Pengembangan, Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	357.801.240	Persentase PMKS Penerima Program Pelayanan	100 persen	750.000.000	Persentase PMKS Penerima Program Pelayanan	100	Dinas Sosial	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial			Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Jaminan Sosial			
35	Program pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.692.673.000	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	1.720.910.000	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (%)	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	TIDAK SESUAI
36	program pencegahan dan Penanggulangan Bencana	1.640.310.000	Persentase penanganan bencana	100 Persen	660.000.000	Indeks Resiko Bencana	135 (Sedang)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TIDAK SESUAI
37	Program Pembinaan, Pengamanan dan Penegakan Perda	217.201.600	Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada	217.201.600 %	-	Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda Dan Perkada (%)	-	"Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran"	TIDAK SESUAI
38	Program Pembinaan, Kesiapsiagaan dan kedaruratan Pemadaman Kebakaran	354.165.000	Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran	100 %	500.000.000	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response TimeRate) Kejadian Kebakaran (%)	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	TIDAK SESUAI
38	Program Pembinaan Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	4.696.125.800	Rasio PolPP per 10.000 penduduk	170 Orang	-	Rasio Petugas Linmas Per 10.000 Penduduk	1:70	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	TIDAK SESUAI
39	Program Pembinaan dan Penyuluhan Pendidikan Politik Kabupaten dan Masyarakat	1.824.698.346	Tingkat Fasilitasi dan Tertib Administrasi Partai Politik (%), Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu & Pemilukada	100 %	560.000.000	Tingkat Fasilitasi dan Tertib Administrasi Partai Politik (%), Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu & Pemilukada	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			(%) dan Jumlah Desa Sadar Politik			(%) dan Jumlah Desa Sadar Politik			
40	Program pengembangan kewaspadaan nasional	689.272.396	Tercapainya Program Pengembangan Kewaspadaan Nasional	100 %	490.000.000	Cakupan Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing Kabupaten (%)	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TIDAK SESUAI
41	Program pengembangan wawasan kebangsaan	120.000.000	Pelaksanaan HUT RI dan Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten tanah Laut	2 Kali	-	Jumlah Rapat	-	"Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan"	TIDAK SESUAI
42	Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	362.051.700	Pembinaan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100 %	450.000.000	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara RI Bagi Masyarakat (%)	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TIDAK SESUAI
43	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	939.366.760	Cakupan Fasilitasi Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP(%), Jumlah Lembaga Keagamaan yang aktif dalam peningkatan produktifitas umat (lembaga), jumlah konflik intern dan antar umat beragama (kasus), jumlah	100 %	600.000.000	Cakupan Fasilitasi Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP (%)	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			desa peduli toleransi						
44	Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	17.665.000	IKM	1 Nilai	18.000.000	IKM	B	Kurau Kantor Kurau	TIDAK SESUAI
		43.000.800	FALSE	FALSE	52.500.000	IKM	B	Jorong Kantor Jorong	TIDAK SESUAI
		42.210.000	IKM	3 Nilai	-	IKM	-	Batu Ampar Kantor Batu Ampar	TIDAK SESUAI
		30.480.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	3 nilai	75.000.000	IKM	B	Pelaihari	TIDAK SESUAI
		25.000.000	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat; Terlaksananya kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat	9 kali; 40 orang	45.000.000	IKM	B	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang	TIDAK SESUAI
		9.233.000	IKM	88 Nilai	18.360.000	IKM	B	Bati-Bati Kantor Bati- Bati	TIDAK SESUAI
		13.000.000	IKM	1 NLAI	22.000.000	IKM	B	Bumi Makmur	TIDAK SESUAI
		15.000.000	IKM	1 nilai	15.000.000	IKM	B	Kintap Kantor Kintap	TIDAK SESUAI
		12.699.400	Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	10.700.000	IKM	B	Takisung Kantor Takisung	TIDAK SESUAI
45	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kelurahan	45.103.000	IKM	1 nilai	62.000.000	IKM	B	Kel. Angsau	TIDAK SESUAI
		64.300.000	IKM	1 NILAI	34.000.000	IKM	B	Kel. Karang Taruna	TIDAK SESUAI
		107.534.000	IKM	1 Nilai	43.500.000	IKM	B	Kel. Pabahanan	TIDAK SESUAI
		31.612.500	IKM	1 nilai	37.490.000	IKM	B	Kel. Pelaihari	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

		35.000.000	IKM	0 NILAI	35.000.000	IKM	B	Kel. Sarang Halang	TIDAK SESUAI
46	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	825.729.000	Presentase layanan angkutan darat	44,2 %	258.000.000	Persentase Layanan Angkutan Darat	44,2 %	Dinas Perhubungan	TIDAK SESUAI
47	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	350.159.700	Nilai IKM	3 Nilai	550.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	Dinas Perhubungan	TIDAK SESUAI
48	Program peningkatan layanan angkutan, Sarana dan Fasilitas Perhubungan Darat	1.381.680.000	Jumlah Fasilitas Jalan	78 Unit	1.946.450.000	Jumlah Fasilitas Jalan	78	Dinas Perhubungan	TIDAK SESUAI
49	Program pengembangan sektor Perhubungan laut, sungai dan penyeberangan	656.994.000	Jumlah pelabuhan dan Dermaga penyeberangan	1,2 Buah	973.850.000	Jumlah Pelabuhan Dan Dermaga Penyebrangan	1 Pelabuhan, 2 Dermaga	Dinas Perhubungan	TIDAK SESUAI
50	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	265.476.960	Jumlah Dermaga Penyeberangan	1 buah	149.000.000	Jumlah Dermaga Penyebrangan	1 Dermaga	Dinas Perhubungan	TIDAK SESUAI
51	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	620.000.000	Pemantauan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara	100 %; 50,75 Skor; 83 Skor	814.000.000	-	BAIK	"Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup"	TIDAK SESUAI
52	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	219.576.712	FALSE	FALSE	-	-	-	"Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup"	TIDAK SESUAI
53	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	348.811.312	Cakupan penanganan penyelesaian kasus lingkungan hidup (%)	100 %	591.900.000	-	BAIK	"Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup"	TIDAK SESUAI
54	Program Tata Lingkungan	718.734.403	Target IKLH Kab. Tanah Laut	6.096 %	817.500.000	-	-	"Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup"	TIDAK SESUAI
55	Program Tata Kota dan Kebersihan	18.920.753.279	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas	1 RTH; 3.650 Ton	26.269.800.000	-	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			wilayah kota/kawasan perkotaan (unit RTH); Jumlah timbunan sampah di TPA Bakunci yang dapat di kurangi (Ton)						
56	Program Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (K3)	1.133.557.931	Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu di laboratorium lingkungan (%)	100 %	1.100.000.000	-	BAIK	“Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup UPT Laboratorium Lingkungan”	TIDAK SESUAI
57	Program Administrasi Tata Guna Tanah dan Fasilitas umum	260.000.000	Terlaksananya pelayanan tata guna tanah dan fasilitas umum di wilayah kabupaten tanah laut	0 Dokumen	-	Cakupan Inventarisasi Tanah Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	100	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	TIDAK SESUAI
58	Program Penataan Administrasi Kependudukan	995.742.520	FALSE	FALSE	-	Tercapainya Tertib Administrasi Kependudukan	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TIDAK SESUAI
		6.588.000	Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai	-	IKM	-	Panyipatan Kantor Panyipatan	TIDAK SESUAI
59	Program pendataan dan pelayanan pencatatan sipil	156.116.000	Cakupan penerbitan akta kelahiran; Rasio bayi berakta kelahiran; Rasio pasangan berakta nikah	100 %; 0,97 ; 0,13	150.000.000	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TIDAK SESUAI
60	Program pendataan dan pelayanan pendaftaran penduduk	555.264.380	Cakupan penerbitan KTP elektronik;	100 %; 1 ; 100 %; 100	336.500.000	Cakupan penerbitan KTP elektronik;	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk; Cakupan pelayanan administrasi migrasi; Cakupan penduduk rentan administrasi kependudukan; Desa sadar administrasi kependudukan	%; 100 %		Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk; Cakupan pelayanan administrasi migrasi; Cakupan penduduk rentan administrasi kependudukan; Desa sadar administrasi kependudukan			
61	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	34.702.800	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100 skor	-	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Skor)	-	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	TIDAK SESUAI
62	Program Peningkatan Kualitas Hidup & perlindungan Perempuan dan Anak	205.080.810	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	134.870.772 skor	134.870.000	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Skor)	68,44	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	TIDAK SESUAI
63	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	578.117.980	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	62.353.014 skor	-	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Skor)	88,75	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	TIDAK SESUAI
		20.950.000	Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai	-	IKM	-	Panyipatan Kantor Panyipatan	TIDAK SESUAI
		11.995.000	FALSE	FALSE	-	-	-	Bati-Bati Kantor Bati- Bati	TIDAK SESUAI
		233.700.000	Tercapainya peningkatan peran serta dan kesejahteraan gender dalam pembangunan	0 %	-	-	-	Kel. Pabahanan	Tidak ada Program pada RPJMD

Informasi ringkasan RKP

		107.300.000	Terbinanya Organisasi Perempuan Melalui Pertemuan-Pertemuan	0 %	-	-	-	Kel. Sarang Halang	TIDAK SESUAI
64	Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk	398.673.719	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	498.607.115 %	498.600.000	Persentase Sektor Yang Tersosialisasi Konsep Pembangunan Yang Berwawasan Berkependudukan dan Alat Ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunn Berwawasan Kependudukan)Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	18,51	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	TIDAK SESUAI
65	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	2.017.657.030	Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	500.000.000	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) BerKB	70	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	TIDAK SESUAI
66	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	741.380.600	presentase peserta latih yang berkompeten	65 %	790.000.000	Persentase Peserta Latih Yang Berkompeten	65	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	TIDAK SESUAI
67	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	642.477.600	tingkat kesempatan kerja	4 %	350.000.000	Tingkat Kesempatan Kerja	4	"Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian"	TIDAK SESUAI
68	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Harmonisasi Hubungan Industrial	194.000.000	cakupan sengketa perusahaan pekerja yang diselesaikan	27 %	175.000.000	Cakupan Sengketa PerusahaanPekerja Yang Diselesaikan	27	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

69	Program Peningkatan Kualitas Pengembangan Koperasi dan UMK	244.703.800	koperasi aktif	100 Unit	500.000.000	Koperasi Aktif	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	TIDAK SESUAI
70	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	105.296.200	koperasi aktif	100 Unit	-	Koperasi Aktif	-	"Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan"	TIDAK SESUAI
71	program peningkatan realisasi perijinan dan non perijinan pelaku jenis non usaha	78.000.000	Indek Kepuasan Masyarakat	80,45 Baik	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TIDAK SESUAI
72	program peningkatan realisasi perijinan dan non perijinan pelaku jenis usaha	73.000.000	Indek Kepuasan Masyarakat	80,45 Baik	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TIDAK SESUAI
73	program pengembangan investasi daerah	489.000.000	Jumlah Realisasi Investasi	931.82 4.000.000 Rupiah	315.000.000	Capaian Realisasi Kesepakatan Pelaku Investasi (Kesepakatan)	6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TIDAK SESUAI
74	Program peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan	139.526.100	Indek Kepuasan Masyarakat	80,45 Baik	145.050.000	Persentase Pelaku Usaha Yang Taat Dalam Melaksanakan Kewajiban Sesuai Dengan UU (%)	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TIDAK SESUAI
75	Program Pengembangan Pelestarian Adat Dan Kebudayaan Daerah	2.388.895.600	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %	1.170.000.000	Budaya Lokal Yang Dilestarikan (%)	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TIDAK SESUAI
76	Program peningkatan peran serta kepemudaan	70.890.000	FALSE	FALSE	-	-	-	Bajuin Kantor Bajuin	TIDAK SESUAI
		86.800.000	IKM	0 jumlah latihan	-	-	-	Batu Ampar Kantor Batu Ampar	TIDAK SESUAI
		40.299.700	Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai	-	IKM	-	Panyipatan Kantor Panyipatan	TIDAK SESUAI
		40.000.000	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar	0 orang	-	-	-	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

77	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	60.000.000	IKM	0 jumlah kegiatan	-	-	-	Batu Ampar Kantor Batu Ampar	TIDAK SESUAI
		10.272.931.586	jumlah cabang olahraga dan atlet berprestasi	30,19 jumlah 30 cabang olahrag a dan 68 atlet berpres tasi	2.479.380.000	Jumlah Cabang Olah Raga Dan Atlet Berprestas	30 Cabor 194 Atlet	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	TIDAK SESUAI
78	Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan	3.324.395.600	jumlah organiasi pemuda aktif	9,5 jumlah 5 OKP dan 5 Wirusaha	2147.630.000	Jumlah Organisasi Aktif	7 OKP Dan 5 Jenis Wirusaha	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	TIDAK SESUAI
79	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	10.367.500	Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai	-	IKM	-	Panyipatan Kantor Panyipatan	TIDAK SESUAI
80	Program Mutasi, Data dan Informasi	2.021.120.970	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah; Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah; Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	26 Orang; 612 Orang; 234 Orang	1.455.410.000	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah; Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah; Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	26 Orang,61 2 Orang,23 4 Orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TIDAK SESUAI
81	Program Pembinaan, Pengembangan dan Formasi Aparatur	3.553.309.890	Rata - Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan; Persentase ASN Yang mengikuti	20 Jam; 97,58 %; 64,85 %; 64,85 %	2.757.920.000	Berkembangnya Aparatur Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah	20 Jam,97.5 8,64.85	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Nama Program pada RPJMD adalah Program Pembinaan Dan

Informasi ringkasan RKP

			Pendidikan dan Pelatihan Formal; Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural; Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural			Laut			Pengembangan Aparatur
82	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	625.454.026	Nilai IKM	3 Nilai	1.840.170.000	IKM	BAIK	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	TIDAK SESUAI
		20.000.000	IKM	85 Baik	41.600.000	IKM	BAIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	TIDAK SESUAI
		100.000.000	IKM	3 Nilai	986.740.000	IKM	BAIK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TIDAK SESUAI
		111.758.152	Nilai IKM	3 Nilai	490.450.000	IKM	BAIK	Dinas Perhubungan	TIDAK SESUAI
		651.780.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	530.000.000	IKM	BAIK	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	TIDAK SESUAI
		446.965.300	IKM	0 Nilai	975.000.000	IKM	BAIK	Inspektorat Kabupaten	TIDAK SESUAI
		103.950.000	Indek Kepuasan Masyarakat	80,45 Baik	52.500.000	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

		50.000.000	Jumlah Unit	3	38.500.000	Jumlah Pegawai Dan Gedung	65 Orang/ 1 Uni	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	TIDAK SESUAI
		49.340.100	Nilai IKM	3 Baik	880.000.000	IKM	BAIK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TIDAK SESUAI
		2.816.514.975	Persentase kepuasan pelanggan pada rumah sakit	0 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari"	TIDAK SESUAI
		413.930.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Nilai	630.000.000	IKM	BAIK	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	TIDAK SESUAI
		29.750.000	IKM	75 75	1.959.000.000	IKM	BAIK	Sekretariat DPRD	TIDAK SESUAI
		363.301.480	Nilai IKM	3 Nilai	472.930.000	IKM	BAIK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TIDAK SESUAI
		12.600.000	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100 %	231.830.000	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TIDAK SESUAI
		729.969.320	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks	5.941.100.000	IKM	3,3	Dinas Kesehatan	TIDAK SESUAI
		146.168.400	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Jenis	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batakan"	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

						Kualitas Sumber Daya Manusia (%)			
		59.320.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kurau"	TIDAK SESUAI
		93.043.000	Persentasi pemenuhan peningkatan sarana /prasarana kerja dan kualitas sumber daya	0 persen	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Luas"	TIDAK SESUAI
		79.900.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bati-Bati"	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

		48.600.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kait-Kait"	TIDAK SESUAI
		71.350.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tambang Ulang"	TIDAK SESUAI
		62.800.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Pelaihari"	TIDAK SESUAI
		65.627.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Riam"	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

						Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)			
		17.750.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tirta Jaya"	TIDAK SESUAI
		67.320.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Tanjung Habulu"	TIDAK SESUAI
		71.800.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Jorong"	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

		29.750.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Asam Asam"	TIDAK SESUAI
		99.700.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Kintap"	TIDAK SESUAI
		106.632.400	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Cuka"	TIDAK SESUAI
		16.400.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Angsau"	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

						Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)			
		20.200.000	"Persentase Pemenuhan Peningkatan Sarana /prasarana kerja dan kualitas Sumber Daya manusia"	0 indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi	TIDAK SESUAI
		950.000.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Kategori	1.241.800.000	IKM	BAIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TIDAK SESUAI
		0	IKM	3 Nilai	530.000.000	IKM	BAIK	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	TIDAK SESUAI
		1.292.582.400	Indeks Kepuasan Masyarakat ; Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai; 0 Nilai	1.641.890.000	IKM	BAIK	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	TIDAK SESUAI
		196.240.800	Persentase Peningkatan kualitas aparatur dan pemeliharaan sarpras kantor	0 persen	31.500.000	IKM	B	"Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Peralatan Dinas Pekerjaan Umum"	TIDAK SESUAI
82	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	856.766.000	IKM	0 Nilai	960.030.000	Jumlah ASN	120	Sekretariat Daerah Bagian Umum	TIDAK SESUAI
		18.500.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 persen	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana	-	"Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Bumi Makmur"	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

					Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)			
	0	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	29.060.000	IKM	B	"Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum"	TIDAK SESUAI
	315.467.500	Indeks Kepuasan Masyarakat	2 Nilai	980.800.000	IKM	Sangat Baik	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian UPT Balai Latihan Kerja	TIDAK SESUAI
	33.450.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Nilai	171.510.000	IKM	B	Dinas Komunikasi dan Informatika	TIDAK SESUAI
	391.218.100	indeks kepuasan masyarakat	2 huruf	1.978.000.000	IKM	SANGAT BAIK	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	TIDAK SESUAI
	64.250.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai	94.500.000	IKM	B	Dinas Sosial	TIDAK SESUAI
	350.718.535	IKM	3 Nilai	368.750.000	IKM	B	Badan Pendapatan Daerah	TIDAK SESUAI
	449.375.000	IKM	1 Nilai	545.000.000	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TIDAK SESUAI
	365.944.000	IKM	1 Pelaporan	78.750.000	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta	100	Dinas Pariwisata	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

						Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)			
		462.400.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 Indeks	-	Cakupan Ketersediaan Dan Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (%)	-	Dinas Kesehatan RSUD Kintap	TIDAK SESUAI
		10.700.000	IKM	1 Nilai	167.730.000	IKM	B	Kurau Kantor Kurau	TIDAK SESUAI
		40.581.000	IKM	3 nilai	231.010.000	IKM	B	Bajuin Kantor Bajuin	TIDAK SESUAI
		8.770.000	IKM	0 Nilai	50.000.000	IKM	B	Jorong Kantor Jorong	TIDAK SESUAI
		13.200.000	IKM	3 Nilai	113.400.000	IKM	B	Batu Ampar Kantor Batu Ampar	TIDAK SESUAI
		0	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran; Terlaksananya pembangunan gedung kantor; Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor; Terlaksananya	12 Unit; 5 jenis; 0 unit; 1 unit; 3 orang; 0 orang	135.000.000	IKM	B	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			peningkatan kemampuan teknis aparatur; Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						
		18.000.000	IKM	88 Nilai	114.320.000	IKM	B	Bati-Bati Kantor Bati- Bati	TIDAK SESUAI
		159.413.800	IKM	1 nilai	100.000.000	IKM	B	Kintap Kantor Kintap	TIDAK SESUAI
		5.600.000	IKM	1 nilai	52.000.000	IKM	B	Angsau	TIDAK SESUAI
		37.540.000	IKM	1 NILAI	61.000.000	IKM	B	Karang Taruna	TIDAK SESUAI
		79.000.000	IKM	1 Nilai	89.000.000	IKM	B	Pabahanan	TIDAK SESUAI
		70.000.000	IKM	1 nilai	167.730.000	IKM	B	Kel.Pelaihari	TIDAK SESUAI
		116.500.000	IKM	0 NILAI	71.200.000	IKM	B	Kel. Sarang Halang	TIDAK SESUAI
83	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.264.300.300	Nilai Sakip		1.339.970.000	Persentase Temuan Yang Material Pada Obrik	30%	Inspektorat Kabupaten	TIDAK SESUAI
84	Program peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (GG)	819.179.400	Nilai Sakip	0 Nilai	1.288.430.000	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3,4	Inspektorat Kabupaten	TIDAK SESUAI
85	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	76.107.000	Indeks kepuasan masyarakat	0 Nilai	-	-	-	"Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan"	TIDAK ADA PROGRAM PADA RPJMD
		80.000.000	FALSE	FALSE	-	-	-	Sekretariat DPRD	
		30.000.000	FALSE	FALSE	-	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKPD

						Pelatihan Forma			
		25.000.000	FALSE	FALSE	-	-	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TIDAK SESUAI
86	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	41.323.443.520	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	75 75	33.130.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK	Sekretariat DPRD	TIDAK SESUAI
87	Program Pengelolaan Informasi, Humas, Keprotokolan dan Perlengkapan DPRD	458.990.000	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	75 75	393.200.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK	Sekretariat DPRD	TIDAK SESUAI
88	Program Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum	800.000.000	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah/ lainnya/ bantuan hukum dan HAM, publikasi produk hukum daerah	100 %	929.320.000	Terpasilitanya Penyusunan Produk Hukum Daerah/ Lainnya / Bantuan Hukum Dan HAM, Publikasi Produk Hukum Daerah	100	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	TIDAK SESUAI
89	Program Kerjasama Informasi dan Mass Media	1.623.551.200	Media Informasi	2.733.8 22.000 4 Media	2.733.820.000	Media Informasi	4	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	TIDAK SESUAI
90	Program Pembinaan, Pengembangan, Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	876.448.800	Nilai IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat)	868.23 4.500 Baik	929.760.000	Nilai IKM	BAIK	Sekretariat Daerah Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	TIDAK SESUAI
91	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat	24.910.000.000	Nilai IKM	80 Nilai	24.695.510.000	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	TIDAK SESUAI
92	Program Fasilitasi Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH	1.194.560.000	IKM	0 Nilai	-	-	-	Sekretariat Daerah Bagian Umum	TIDAK ADA PROGRAM DALAM RPJMD
93	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan	680.000.000	Peningkatan Nilai LPPD	3,1 Persent ase	143.000.000	Jumlah Dokumen LKPJ,LPPD,Lap ora	3 Dok	Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintaha n	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

	Kerjasama Antar Pemerintahan					n Dukungan Penyelenggaraan Politik, Penyelesaian Masalah Batas Daerah			
94	Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan	800.000.000	INDEKS NILAI REFORMASI BIROKRASI`	1 NILAI REFORMASI BIROKRASI	-	Indeks Reformasi Birokrasi (Skor)	67(baik)	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	TIDAK SESUAI
95	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pajak daerah	541.063.339	Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	6,75 %	739.740.000	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	6,75	Badan Pendapatan Daerah	TIDAK SESUAI
96	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB dan BPHTB	1.545.743.492	Pertumbuhan penerimaan PBB- P2 dan BPHTB	9,81 %	2.200.420.000	Persentase Pertumbuhan Penerimaan PBB Dan BPHTB	9,81	Badan Pendapatan Daerah	TIDAK SESUAI
97	program peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan lain- lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan	324.643.000	Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan lain- lain; Persentasi pertumbuhan retribusi daerah	4,54 %; 0,96 %	453.450.000	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	0,96	Badan Pendapatan Daerah	TIDAK SESUAI
98	Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.056.589.300	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Opini	2.510.920.000	Opini Pengawas Eksternal (BPK) Terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini)	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKPD

99	Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	521.287.700	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Opini	750.000.000	Persentase BMD Yang Dicatat Dengan Akurat (%)	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TIDAK SESUAI
100	program peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan	963.625.820	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Opini	1.468.190.000	Persentase SKPD Yang Menerapkan Laporan Keuangan Yang Berbasis Akrua l (%)	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TIDAK SESUAI
101	Program peningkatan pemanfaatan dan pengendalian Aset Daerah	1.326.133.085	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Opini	850.000.000	Persentase BMD Yang Sudah Dilengkapi Persyaratan Untuk Dipelihara Dan Dimanfaatkan (%)	90	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TIDAK SESUAI
102	Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah	799.999.960	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	20 %	856.530.000	Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Potensi PerekonomiAn Daerah	100	"Sekretariat Daerah Bagian Perekonomia n Pembanguna n"	TIDAK SESUAI
103	Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	799.999.680	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informas yang ditindak lanjuti oleh SKPD	100 %	-	-	-	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	TIDAK SESUAI
104	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	27.402.000	IKM	1 Nilai	14.120.000	IKM	B	Kurau Kantor Kurau	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKPD

		6.750.000	ikm	3 nilai	6.750.000	IKM	B	Bajuin Kantor Bajuin	TIDAK SESUAI
		35.320.976	IKM	0 Nilai	15.000.000	IKM	B	Jorong Kantor Jorong	TIDAK SESUAI
		3.034.400	Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai	5.000.000	IKM	B	Panyipatan Kantor Panyipatan	TIDAK SESUAI
		13.150.000	Persentasi peningkatan pelayanan masyarakat	100 %	20.000.000	IKM	B	Pelaihari	TIDAK SESUAI
		25.300.000	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan masyarakat	1 dokumen	13.000.000	IKM	B	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang	TIDAK SESUAI
		15.000.000	IKM	88 Nilai	15.000.000	IKM	B	Bati-Bati Kantor Bati- Bati	TIDAK SESUAI
		12.000.000	IKM	1 NILAI	15.000.000	IKM	B	Bumi Makmur	TIDAK SESUAI
		50.541.805	Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	21.120.000	IKM	B	Takisung Kantor Takisung	TIDAK SESUAI
105	Program perencanaan pembangunan Kecamatan	30.587.000	IKM	1 Nilai	10.290.000	IKM	B	Kurau Kantor Kurau	TIDAK SESUAI
		12.867.500	ikm	3 nilai	16.920.000	IKM	B	Bajuin Kantor Bajuin	TIDAK SESUAI
		20.825.200	IKM	0 Nilai	21.000.000	IKM	B	Jorong Kantor Jorong	TIDAK SESUAI
		38.990.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 nilai	26.250.000	IKM	B	Pelaihari	TIDAK SESUAI
		12.000.000	Terlaksananya kegiatan perencanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa; Terselenggaranya kegiatan penyenggaraan	9 dokumen; 9 dokumen	16.000.000	IKM	B	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			musrenbang kecamatan						
		12.821.000	IKM	88 Nilai	21.000.000	IKM	B	Bati-Bati Kantor Bati- Bati	TIDAK SESUAI
		32.076.300	IKM	1 NILAI	27.240.000	IKM	B	Bumi Makmur	TIDAK SESUAI
		15.000.000	jumlah dokumen	1 nilai	15.000.000	IKM	B	Kintap Kantor Kintap	TIDAK SESUAI
		22.501.000	Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	21.380.000	IKM	B	Takisung Kantor Takisung	TIDAK SESUAI
106	Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	50.639.000	IKM	1 Nilai	37.490.000	IKM	B	Kurau Kantor Kurau	TIDAK SESUAI
		24.090.400	ikm	3 nilai	47.730.000	IKM	B	Bajuin Kantor Bajuin	TIDAK SESUAI
		26.507.000	IKM	0 Nilai	52.500.000	IKM	BB	Jorong Kantor Jorong	TIDAK SESUAI
		15.205.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	3 nilai	73.500.000	IKM	B	Pelaihari	TIDAK SESUAI
		9.000.000	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa; Terlaksananya kegiatan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa; Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan (Paskibraka); Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelenggara	9 dokumen; 1 kali kegiatan; 30 jumlah orang; 0 dokumen	87.000.000	IKM	B	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKPD

			an administrasi desa						
		64.524.000	IKM	88 Nilai	81.120.000	IKM	B	Bati-Bati Kantor Bati- Bati	TIDAK SESUAI
		90.000.000	IKM	1 NILAI	154.250.000	IKM	B	Bumi Makmur	TIDAK SESUAI
		86.696.000	IKM	1 nilai	103.000.000	IKM	B	Kintap Kantor Kintap	TIDAK SESUAI
		29.581.100	Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	96.460.000	IKM	B	Takisung Kantor Takisung	TIDAK SESUAI
107	Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat	1.137.000.000	IKM	1 Nilai	312.730.000	IKM	B	Kurau Kantor Kurau	TIDAK SESUAI
		710.402.800	IKM	3 nilai	151.300.000	IKM	B	Bajuin Kantor Bajuin	TIDAK SESUAI
		1.279.248.500	IKM	0 Nilai				Jorong Kantor Jorong	TIDAK SESUAI
		882.480.000	IKM	3 3	210.000.000	IKM	B	Batu Ampar Kantor Batu Ampar	TIDAK SESUAI
		1.097.012.350	Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai	121.720.000	IKM	B	Panyipatan Kantor Panyipatan	TIDAK SESUAI
		1.383.342.400	IKM	0 nilai	632.290.000	IKM	B	Pelaihari	TIDAK SESUAI
		723.415.000	Terlaksananya kegiatan pentas seni,budaya ,festival ,lomba cipta dan kompetisi olahraga; Terlaksananya kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat; Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi	5.000 orang; 570 orang; 24 orang	450.630.000	IKM	B	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKPD

			penanggulangan kemiskinan dikecamatan						
		1.247.840.000	IKM	88 Nilai	380.420.000	IKM	B	Bati-Bati Kantor Bati- Bati	TIDAK SESUAI
		1.239.801.200	IKM	1 NILAI	337.500.000	IKM	B	Bumi Makmur	TIDAK SESUAI
		1.034.373.000	IKM	1 nilai	182.450.000	IKM	B	Kintap Kantor Kintap	TIDAK SESUAI
		1.716.411.155	Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	379.730.000	IKM	B	Takisung Kantor Takisung	TIDAK SESUAI
108	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	30.000.000	IKM	0 jumlah desa	-	-	-	Batu Ampar Kantor Batu Ampar	TIDAK SESUAI
		24.125.000	Tersusunnya laporan keuangan desa	0 dokume n	-	-	-	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang	TIDAK SESUAI
		16.000.000	FALSE	FALSE	-	-	-	Bati-Bati Kantor Bati- Bati	TIDAK SESUAI
		46.520.000	IKM	1 nilai	-	-	-	Kintap Kantor Kintap	TIDAK SESUAI
109	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi	9.840.000	IKM	1 nilai	40.000.000	IKM	B	Angsau	TIDAK SESUAI
		31.908.000	IKM	1 NILAI	35.500.000	IKM	B	Karang Taruna	TIDAK SESUAI
		34.929.000	IKM	1 Nilai	35.000.000	IKM	B	Pabahanan	TIDAK SESUAI
		9.000.000	IKM	1 nilai	18.000.000	IKM	B	Kel. Pelaihari	TIDAK SESUAI
		56.580.000	IKM	0 BAIK	76.580.000	IKM	B	KeL. Sarang Halang	TIDAK SESUAI
110	Program Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	893.790.000	IKM	1 nilai	464.600.000	IKM	B	Angsau	TIDAK SESUAI
		968.573.200	IKM	1 nilai	-	-	-	Kel. Pelaihari	TIDAK ADA PROGRAM DALAM RPJMD
111	Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	144.106.600	IKM	1 NILAI	217.940.000	IKM	B	Karang Taruna	TIDAK SESUAI
		259.367.700	IKM	1 Nilai	96.400.000	IKM	B	Pabahanan	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKPD

		230.000.000	IKM	0 NILAI	141.000.000	IKM	B	Kel. Sarang Halang	TIDAK SESUAI
112	Program Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	677.558.200	IKM	1 NILAI	464.600.000	IKM	B	Karang Taruna	TIDAK SESUAI
		366.000.000	IKM	1 Nilai	464.600.000			Pabahanan	TIDAK SESUAI
		366.000.000	IKM	0 NILAI	464.600.000	IKM	B	Kel. Sarang Halang	TIDAK SESUAI
113	Program Pembinaan, Pemberdayaan, Tata Kelola Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	585.563.800	Cakupan kinerja Bina Pemerintahan Desa	100 %	-	-	-	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa	TIDAK SESUAI
114	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.033.734.596	Cakupan kinerja program aksi membangun bersama masyarakat	100 %	1.897.500.000	Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (Desa)	100	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa	TIDAK SESUAI
115	Program Pembinaan, Pendataan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan	5.347.669.622	Cakupan ketersediaan data terkini profile dan potensi desa	100 %	1.078.000.000	Cakupan Ketersediaan Data Terkini Profil Dan Potensi Desa (%)	100	Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa	TIDAK SESUAI
116	Program Pemberdayaan Masyarakat	36.008.000	IKM	1 Nilai	18.000.000	IKM	B	Kurau Kantor Kurau	TIDAK SESUAI
		24.900.000	ikm	3 nilai	41.840.000	IKM	B	Bajuin Kantor Bajuin	TIDAK SESUAI
		90.688.800	IKM	3 Nilai	18.000.000	IKM	B	"Jorong Kantor Jorong"	TIDAK SESUAI
		20.000.000	IKM	3 Nilai	55.000.000	IKM	B	Batu Ampar Kantor Batu Ampar	TIDAK SESUAI
		15.530.400	Indeks kepuasan masyarakat	3 Nilai	39.000.000	IKM	B	Panyipatan Kantor Panyipatan	TIDAK SESUAI
		83.491.000	Indeks Kepuasan Masyarakat	3 nilai	105.000.000	IKM	B	Pelaihari	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

		37.000.000	Terlaksananya fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi; Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan desa; Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender	1 kegiatan; 9 desa; 6 kegiatan	73.000.000	IKM	B	Tambang Ulang Kantor Tambang Ulang	TIDAK SESUAI
		36.940.000	IKM	88 Nilai	69.210.000	IKM	B	"Bati-Bati Kantor Bati- Bati"	TIDAK SESUAI
		50.000.000	IKM	1 NILAI	65.160.000	IKM	B	Bumi Makmur	TIDAK SESUAI
		17.000.000	IKM	1 nilai	20.000.000	IKM	B	Kintap Kantor Kintap	TIDAK SESUAI
		72.751.000	Indek Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	72.750.000			"Takisung Kantor Takisung"	TIDAK SESUAI
117	Program Pengembangan dan Tata Kelola Kearsipan	269.982.800	Tingkat tertib administrasi kearsipan daerah	100 Persen	228.650.000	Tingkat Tertib Administrasi Kearsipan Daerah (%)	100	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	TIDAK SESUAI
118	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.029.000.000	Persentase SKPD yang menerapkan e-government	0 Persen	1.111.010.000	Persentase SKPD Yang Menerapkan E-Government	8,9%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TIDAK SESUAI
119	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	50.000.000	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam	0 Persen	43.200.000	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam	2,40%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			komunikasi perangkat daerah			Komunikasi Perangkat Daerah			
120	Program Pengelolaan Komunikasi Publik	691.000.000	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0 Persen	666.290.000	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	27%	Dinas Komunikasi dan Informatika	TIDAK SESUAI
121	Program Pembinaan, Pengembangan dan Tata Kelola Layanan Perpustakaan	665.593.620	IKM Nilai	3 Nilai	467.030.000	IKM	BAIK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TIDAK SESUAI
122	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	560.000.000	Produksi padi; Produksi kedelai; Produksi jagung	248.563 Ton; 550 Ton; 201.588 Ton	1.540.000.000	Produksi padi; Produksi kedelai; Produksi jagung	248.563 Ton; 550 Ton; 201.588 Ton	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	TIDAK SESUAI
123	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	517.311.801	Produksi kelapa sawit; Produksi karet	19.914 Ton; 8.817 Ton	578.010.000	Produksi kelapa sawit; Produksi karet	19.914 Ton; 8.817 Ton	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	TIDAK SESUAI
124	Program Ketersediaan dan distribusi pangan	1.011.687.980	Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat	114 persentase	680.000.000	Rasio Peningkatan Ketersediaan Dan Distribusi Pangan (Rasio Diatas 114%)	SURPLUS	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	TIDAK SESUAI
125	Program Konsumsi dan Keamanan Pangan	444.844.500	meningkatnya Skor PPH	87 Nilai	665.000.000	Peningkatan Skor PPH	88	"Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan"	TIDAK SESUAI
126	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	798.000.000	Peningkatan SDM Penyuluh	100 Orang	536.830.000	Peningkatan Kelembagaan Petani (Kel)	20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	TIDAK SESUAI
127	Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	4.215.000.000	Cakupan penyediaan prasarana dan	100 Persen	6.329.980.000	Cakupan Penyediaan Prasarana Dan	100	"Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan"	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			sarana pertanian			Sarana Pertanian			
128	Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	580.000.000	Produksi Cabai; Produksi bawang merah	14.165 Kwintal; 1.096 Kwintal	1.743.720.000	Produksi Cabai; Produksi bawang merah	14.165 Kwintal; 1.096 Kwintal	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	TIDAK SESUAI
129	Program Peningkatan Populasi dan Produksi Hasil Peternakan	1.190.267.000	peningkatan populasi ternak sapi potong; peningkatan populasi ternak sapi perah; peningkatan populasi ternak kerbau; peningkatan populasi ternak kambing; peningkatan populasi ternak ayam buras; peningkatan populasi ternak ayam ras petelur; peningkatan populasi ternak ayam ras pedaging; peningkatan populasi ternak ayam ras pedaging; peningkatan populasi ternak itik	93.000 ekor; 40 ekor; 4.187 ekor; 25.203 ekor; 2.713.529 ekor; 7.406.600 ekor; 55.474.840 ekor; 55.474.840 ekor; 201.950 ekor	1.165.000.000	Jumlah Populasi Sapi Potong (Ekor),Produksi Daging (Ton),Produksi Telor (Ton)	93.000,11.500,90.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	TIDAK SESUAI
130	Program Kelembagaan Usaha Prasarana dan Sarana	369.999.400	Persentase pelaku usaha binaan bermitra dengan pihak lain; Persentase	3 %; 4 %; 100 %	943.200.000	Persentase Pelaku Usaha Binaan Bermitra Dengan	3,100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			poktan yang dapat mengembangkan usahanya ; Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana peternakan			Pihak Lain, Persentase Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Peternakan			
131	Program Kesehatan Hewan ,Kesehatan Masyarakat Veteriner	382.799.000	Persentase Penurunan Angka kematian ternak ayam buras; Persentase Penurunan Angka kematian ternak kambing; Persentase Penurunan Angka kematian ternak sapi potong; Persentase Penurunan Angka kematian ternak sapi potong perah; Persentase Penurunan Angka kematian ternak kerbau; Persentase Penurunan Angka kematian ternak ayam petelur;	26 %; 24 %; 75 %; 0 %; 5 %; 26 %; 4 %; 5 %; 100 %; 67 %	115.000.000	Persentase Produk Hasil Ternak Yang Seha	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

			Persentase Penurunan Angka kematian ternak ayam ras pedaging; Persentase Penurunan Angka kematian ternak itik;						
132	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	45.000.000	Jumlah Pengembangan dan Peningkatan Mutu serta Kualitas Produksi hasil Peternakan	12 Produk	50.000.000	Jumlah Pengembangan Dan Peningkatan Mutu Serta Kualitas Produksi Hasil Peternakan (Produk	12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	TIDAK SESUAI
134	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	3.247.253.494	Jumlah Wisatawan	290.000 Orang	2.500.000	Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Objek Wisata Yang Dikembangkan Pemerintah (Orang)	290	Dinas Pariwisata	TIDAK SESUAI
135	Program Pengembangan Kemitraan	499.998.966	Jumlah Wisatawan	290.000 Orang	100.000.000	Cakupan Pembinaan Masyarakat Yang Terlibat Dalam Sektor Kepariwisataaaan (%)	20	Dinas Pariwisata	TIDAK SESUAI
136	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Kerjasama Promosi Pariwisata	1.499.999.799	Jumlah Wisatawan	290.000 Orang	1.513.210.000	Jumlah Event Pariwisata Yang Diselenggarakan	2	Dinas Pariwisata	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

						Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Kali)			
137	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	176.758.000	Persentase olahan hasil produksi kelautan dan perikanan	20 persentase	180.000.000	Persentase Berkembangnya Unit Usaha Yang Dibina	20	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	TIDAK SESUAI
138	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	486.663.000	Produksi perikanan tangkap	56.708 ton	1.000.000.000	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	56,708	"Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan"	TIDAK SESUAI
139	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	362.067.600	Produksi perikanan budidaya	1.162 Ton	730.000.000	Produksi Perikanan Budidaya	1,162	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	TIDAK SESUAI
140	Program pengelolaan pasar daerah	2.456.229.270	Pengelolaan pasar rakyat	11 Kecamatan	-	Peningkatan PAD	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan	TIDAK SESUAI
141	Peningkatan Perdagangan, Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrolgian	752.955.200	Indeks Kepuasan Masyarakat	3 Nilai	624.280.000	IKM	BAIK	"Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan"	TIDAK SESUAI
142	Program Pembangunan Sumberdaya Industri	365.502.900	presentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreatifitas industri	100 %	800.000.000	Persentase IKM Yang Mengembangkan Inovasi Dan Kreatifitas Industri	100	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	TIDAK SESUAI
143	Program Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah	354.000.000	Presentase IKM unggulan	25 %	550.000.000	Persentase IKM Unggulan	25	"Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian"	TIDAK SESUAI
144	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	300.000.000	cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukan industri	50 %	525.000.000	Cakupan Fasilitasi Tahapan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (%)	50	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	TIDAK SESUAI
145	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	14.086.600	FALSE	FALSE	-	Nilai LAKIP	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.760.300	IKM	0 Nilai	-	-	-	Inspektorat Kabupaten	TIDAK SESUAI
		8.622.800	Nilai Sakip	71 Baik	-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TIDAK SESUAI
		11.067.508	Persentase tingkat capaian kinerja organisasi	0 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari"	TIDAK SESUAI
		26.140.300	FALSE	FALSE	-	-	-	Sekretariat DPRD	TIDAK SESUAI
		2.000.000	Meningkatkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0 Persen	-	Meningkatkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TIDAK SESUAI
		100.000.000	Nilai LAKIP	0 %	-	-	-	Dinas Kesehatan	TIDAK SESUAI
		6.840.000	FALSE	FALSE	-	Nilai SAKIP Dinas B	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	TIDAK SESUAI
		6.217.000	Jumlah penyusunan laporan akhir tahun (LAKIP, LKPJ dan LPPD)	0 dokumen	-	NILAI SAKIP B	-	Dinas Sosial	TIDAK SESUAI
		51.625.000	FALSE	FALSE	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	TIDAK ADA PROGRAM DALAM RPJMD
		4.756.700	FALSE	FALSE	-	-	-	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	TIDAK SESUAI
		7.198.900	Nilai Sakip	0 Pelaporan	-	-	-	Dinas Pariwisata	TIDAK SESUAI
146	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	319.925.767	Nilai LAKIP perangkat daerah (Kategori)	71 Nilai	171.310.000	-	-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup	TIDAK SESUAI
		34.283.600	IKM	85 Baik	39.740.000	lkm	BAIK	"Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM"	TIDAK SESUAI
		83.892.400	IKM	3 Nilai	40.000.000	Nilai LAKIP	A	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKPD

		43.114.336	Nilai LAKIP	68,4	11.000.000	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	B	"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil"	TIDAK SESUAI
		59.350.000	Nilai SAKIP	1 Nilai	8.600.000	Nilai SAKIP	B	Dinas Perhubungan	TIDAK SESUAI
		318.214.800	Nilai SAKIP	71 Nilai	330.000.000	Nilai Lakip	BB	"Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan"	TIDAK SESUAI
		62.080.500	Nilai Sakip	0 Nilai	-	-	-	Inspektorat Kabupaten	TIDAK SESUAI
		19.279.600	Nilai Sakip	71 Baik	10.500.000	Tersedianya Dokumen Renstra Perangkat Daerah Yang Selaras Dengan RPJMD (Dokumen)	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TIDAK SESUAI
		102.069.328	Nilai SAKIP	61 Baik	-	Tersedianya Dokumen Renstra Perangkat Daerah Yang Selaras Dengan RPJMD (Dokumen)	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TIDAK SESUAI
		132.662.600	Nilai Sakip	61 Nilai	-	-	-	"Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan"	TIDAK SESUAI
		8.371.920	Persentase nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	0 %	-	-	-	"Dinas Kesehatan RSUD H. Boejasin Pelaihari"	TIDAK SESUAI
		35.709.500	Nilai SAKIP	1 Nilai	10.500.000	Tersedianya Dokumen Renstra Perangkat Daerah Yang Selaras Dengan RPJMD (Dokumen)	1 DOKUMEN	"Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran"	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKPD

		104.017.700	Nilai SAKIP	75 75	94.960.000	Nilai Sakip	BAIK	Sekretariat DPRD	TIDAK SESUAI
		2.850.000	Nilai LAKIP	3 Nilai	5.250.000	Tersedianya Dokumen Renstra Perangkat Daerah Yang Selaras Dengan RPJMD (Dokumen)	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TIDAK SESUAI
		105.000.000	Nilai LAKIP	100	47.500.000	Tersedianya Dokumen Renstra Perangkat Daerah Yang Selaras Dengan RPJMD (Dokumen)	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TIDAK SESUAI
		107.988.000	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	0	287.300.000	Tersedianya Dokumen Renstra Perangkat Daerah Yang Selaras Dengan RPJMD (Dokumen)	72	Dinas Kesehatan	TIDAK SESUAI
		250.000.000	Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	5 Kategori	600.000.000	Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	BB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TIDAK SESUAI
		129.315.000	Nilai SAKIP	71 Nilai	13.500.000	Nilai sakip	BB	"Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan"	TIDAK SESUAI
		225.378.800	Nilai Sakip	0 NILAI	52.500.000	Nilai SAKIP	B	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	TIDAK SESUAI
		51.475.000	Nilai SAKIP	0 Nilai	8.580.000	NILAI SAKIP	B	Dinas Komunikasi dan Informatika	TIDAK SESUAI
		103.064.000	nilai sakip	0 nilai	127.350.000	Tersedianya Dokumen Renstra Perangkat Daerah	1 DOKUMEN	Dinas Sosial	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

						Yang Selaras Dengan RPJMD (Dokumen)			
		76.462.800	Nilai Sakip	61 Nilai				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	TIDAK SESUAI
147	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.384.327.340	IKM	3 Nilai	-	Kesesuaian Antara Pagu RPJMD Dan RKP	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TIDAK SESUAI
		370.371.300	FALSE	FALSE	-	-	-	Sekretariat DPRD	TIDAK SESUAI
148	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	166.578.100	IKM	3 Nilai	-	Kesesuaian Antara Pagu RPJMD Dan RKP Bidang Perencanaan Sosial Dan Budaya	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TIDAK SESUAI
149	Program Penelitian dan Pengembangan	925.000.000	IKM	3 Nilai	1.225.000.000	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Di Tindaklanjuti	70%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TIDAK SESUAI
150	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	219.671.800	IKM	3 Nilai	196.320.000	Antara Pagu RPJMD Dan RKP Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TIDAK SESUAI
151	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	252.256.200	IKM	3 Nilai	568.730.000	Kesesuaian Antara Pagu RPJMD Dan RKP Bidang Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	TIDAK SESUAI

Informasi ringkasan RKP

152	Program Pengembangan Data/Informasi	75.000.000	Buku "Satu Data Kabupaten Tanah Laut"	0 Ada/Tidak Ada	-	-	-	Dinas Komunikasi dan Informatika	TIDAK ADA PROGRAM PADA RPJMD
-----	-------------------------------------	------------	---------------------------------------	--------------------	---	---	---	----------------------------------	------------------------------

Informasi ringkasan RKPD

2. Analisis kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja serta Perangkat Daerah penanggung jawab pada Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rancangan akhir RKPD, dengan Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
Kesimpulan : Ketidaksesuaian sebagian besar pagu dana, indikator dan target kinerja serta Perangkat Daerah penanggung jawab pada Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rancangan akhir RKPD, dengan Bab VII kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
3. Analisis kesesuaian nama program dan kegiatan, pagu dana, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah penanggung jawab pada Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rancangan akhir RKPD, dengan Bab VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah
Rumusan rancangan akhir RKPD telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 Namun Sebagian Indikator Program dalam RKPD belum sesuai dengan Indikator Program dalam RPJMD.

NO	PROGRAM	INDIKATOR	
		RKPD	RPJMD
	Program Penanganan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah rakyat layak huni yang dibangun	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)
	Program Pengelolaan Pasar Daerah	Pengelolaan pasar rakyat	Cakupan pembinaan ketertiban dan keindahan pasar daerah (%)
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	IKM	Tersedianya dokumen Renja Perangkat Daerah yang selaras dengan Renstra dan RKPD (dokumen)

Informasi ringkasan RKPD

4. Analisis kesesuaian perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah pada Bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan Bab III gambaran keuangan daerah dalam RPJMD

Kesimpulan : rancangan akhir RKPD 2021 Telah memuat Analisis kesesuaian perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah pada Bab III kerangka ekonomi dan keuangan daerah hasil dari penjabaran Bab III gambaran keuangan daerah dalam RPJMD

5. Analisis kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja pada Bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD

Kesimpulan : Masih terdapat ketidaksesuaian pencantuman indikator dan target kinerja pada Bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rancangan akhir RKPD dengan Bab VIII kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD

No.	indikator kinerja RPJMD	indikator kinerja RKPD	target kinerja tahun 2021 di	target kinerja tahun 2021 di
	[1]	[[[4]
1		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		69,59
2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,0	9,0
3	Angka harapan hidup (tahun)	Angka Harapan Hidup	69,3	69,3
4		Indeks kepuasan masyarakat		76,5 (Baik)
5	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)	1,38	1,38
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%)	100,00	100,00

Informasi ringkasan RKPD

7	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)	Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)	100,00	100,00
8	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)	100,00	100,00
9	Jumlah Atlet yang berprestasi	Jumlah Atlet yang berprestasi provinsi dan	74	1
10	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%)	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD	100,00	100,00
11		Jumlah penghargaan inovasi public		1 penghargaan
12	Jumlah inovasi pelayanan publik yang didaftarkan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan	2 inovasi	2 inovasi
13		Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap		15 Unit Usaha
14	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha
15		Indeks Reformasi Birokrasi	6,2 (Baik)	6,2 (Baik)
16	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)	BB	BB
17	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)	WTP	WTP
18	Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan informasi public	70,00	70,00
19	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)	40	40
20		Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama		100
21	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama	0	0
22	Jumlah konflik sosial (kasus)	Jumlah konflik sosial	0	0

Informasi ringkasan RKPD

23		Angka Kemiskinan (%)	-	4,6
24	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,95	3,50
25	Indeks Gini (skor)	Indeks Gini (skor)	0,255	0,22
26	Indeks Pembangunan Gender (skor)	Indeks Pembangunan Gender (skor)	88,75	88,75
27	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,80	4,0
28	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)	130 (sedang)	130 (Sedang)
29	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100,00
30	Persentase PMKS yang menjadi mandiri	Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	20,00	20,0
31		Indeks Pembangunan Infrastruktur		70,75
32	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	93	93,00
33	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	73	95,00
34		Persentase Pertumbuhan sector unggulan daerah	-	5.03
35	Pertumbuhan sektor pertanian (%)	Pertumbuhan sektor	3,52	3,52
36	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,68	7,58
37	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan	Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata	290	290.000
38	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	Skor PPH Ketersediaan (nilai)	95	95,00
39	Desa Berketahanan Pangan (%)	Desa Berketahanan Pangan	100	100,00
40	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	75	60,96
41	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	87	65,00
42		Indeks Desa Membangun (skor)	-	0,750 (Maju)

Informasi ringkasan RKPD

43	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya baik (%)	Cakupan desa yang tata kelola pemerintahannya	100	100,00
44	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	Persentase luasan permukiman kumuh di	7,00	10,00
45	Luasan RTH publik kota (Ha)	Luasan RTH publik kota (Ha)	110,50	110,50

Terdapat Indikator dengan target berbeda antara RPJMD dan RKPD

Indikator	Target	
	RPJMD	RKDPD
Jumlah Atlet yang berprestasi provinsi dan nasional	74	1
Pertumbuhan Ekonomi	4,95	3,50
Indeks Gini (skor)	0,255	0,22
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,80	4,0
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan (%)	73	95,00
Pertumbuhan sektor Industri olahan	7,68	7,58
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	75	60,96
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	87	65,00
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	7,00	10,00

C. PENGUJIAN ATAS PENYUSUNAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN AKHIR RKPD

Tujuan: untuk menguji rumusan rancangan akhir RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan dokumen RKPD

1. Pembentukan tim penyusun RKPD Kabupaten dan penyusunan rencana kerja.
Pembentukan tim penyusun RKPD dan penyusunan rencana kerja Keputusan Bupati Tanah Laut No. 188/45.44-KUM/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 tetapi dalam susunan tim melibatkan tenaga fungsional auditor pada masing-masing pokja, yang tidak seharusnya dilibatkan sebagai tim penyusun karena bertentangan dengan kode etik AAIPI.
2. Pengolahan data dan informasi
Kesimpulan : RKPD telah menyajikan Pengolahan Data dan Informasi
3. Analisis gambaran umum kondisi daerah
Berdasarkan Hasil Reviu dalam Penyusunan RKPD Tahun 2021 telah mencakup 4 (empat) aspek yaitu :
 1. Aspek Pelayanan Umum
 2. Aspek Daya Saing Daerah
 3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 4. Aspek Geografi dan Demografi
4. Analisis ekonomi dan keuangan daerah
Dalam RKPD belum dijelaskan analisis penyebab tidak tercapainya realisasi target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD sebesar 4,85% hanya tercapai 3,8% pada tahun 2019 berdasarkan data BPS tahun 2020, dan bagaimana antisipasi kedepan untuk mengatasi perlambatan ini.

Target dalam RPJMD untuk pertumbuhan tahun 2021 sebesar 4,95%, namun dalam BAB VI rancangan Akhir RKPD 2021 target pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 3,50%.

Dalam RKPD tahun 2021 terdapat tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Informasi ringkasan RKPD

Tahun 2021 yang tidak Sesuai Dengan lampiran permendagri 86 tahun 2017 yg mensyaratkan proyeksi harus mencantumkan/menggambarkan realisasi Tahun (n-3), realisasi Tahun (n-2), Tahun berjalan (n-1), proyeksi dan target pada Tahun Rencana (n), proyeksi dan target tahun (n+1) ;

- 392 -

Tabel T-C.22.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Tahun s.d Tahun

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)					
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah					

5. Evaluasi kinerja tahun lalu telah dibuat, namun menggunakan Format yang berbeda sehingga belum sepenuhnya mempedomani peraturan yang berlaku sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil Evaluasi belum sepenuhnya menggambarkan substansi (penjelasan tabel T-C 19) sesuai dengan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 hal. 388.

6. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah

Kesimpulan : Melalui Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah lingkup Kabupaten Tanah Laut, ditemukan bahwa penelaahan terhadap kebijakan pemerintah **telah** dilakukan sebagai salah satu tahapan tata cara, dan sistematika penyusunan RKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 86.

7. Penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan RKPD 2021 Kabupaten Tanah Laut belum memuat penelaahan pokok-pokok DPRD sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Berdasarkan lampiran permendagri 86 tahun 2017 dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPEDA dengan berkoordinasi dengan

Informasi ringkasan RKPD

perangkat daerah terkait. Rumusan usulan program/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD disajikan dalam tabel T-B.57. lampiran permendagri 86 tahun 2017 halaman 359.

8. Rancangan RKPD 2021 Kabupaten Tanah Laut telah menampilkan beberapa isu dan permasalahan daerah namun belum dilakukan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas kabupaten sebagaimana yang diamanatkan permendagri 86 tahun 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Note : lihat lampiran permendagri nomor 86 tahun 2017 hal 323-324 Tabel T-B.35.

9. Perumusan permasalahan pembangunandaerah

Kesimpulan ; rancangan RKPD 2021 Kabupaten Tanah Laut TELAH menyusun rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan ekonomi sebagaimana yang diamanatkan permendagri 86 tahun 2017.

10. Perumusan RKPD sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD

Hasil pengujian, perumusan RKPD telah sesuai dengan Visi misi, arah kebijakan, dan program kepala daerah dalam RPJMD

No.	RPJMD	RKPD		Sesuai /Tidak
	Sasaran	Prioritas	Sasaran	
	[1]	[2]	[3]	[4]
MISI 1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Peningkatan Kualitas	1).Meningkatnya pemerataan dan perluasan	SESUAI

Informasi ringkasan RKPD

	Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang ditempatkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Sumber Daya Manusia (SDM)	akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang, (2). Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdayasaing. (3).Meningkatnya
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan		(1).Meningkatnya status kesehatan masyarakat,
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya		(2). Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga		(1).Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS (2). Meningkatnyapartisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
MISI 2.	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Pengurangan Kemiskinan Dan Transformasi Ekonomi	(1).Meningkatnya produksi hasil pertanian, (2).Tertatanya Klaster Industri (3). Meningkatnya pembangunan kawasan industri Jorong yang merupakan salah satu PSN, (4).Meningkatnya konektivitas sentra produksi produk unggulan, (5).Meningkatnya fungsi pelabuhan Swarangan, (6).Meningkatnya objek wisata yang telah ada seperti wisatagunung khayangan dengan pemagaran dan pembangunan kebun raya mini (taman rusa), (7).Berkembangnya destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru seperti wisata
	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian		

Informasi ringkasan RKPD

MISI 3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas jalan menjadi prioritas karena termasuk dalam 7
	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur		Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup, dan meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang.
MISI 4	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial	Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan	Meningkatnya penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	Meningkatnya wawasan kebangsaan		Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Meningkatnya aksi sosial keagamaan		Menguatnya Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Layanan Publik berbasis Elektronik
MISI 5	Meningkatnya kualitas Pertumbuhan Ekonomi		
	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah		
	Menurunnya tingkat pengangguran		
	Meningkatnya perlindungan masyarakat		
	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas		
	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah		
	Meningkatnya ketahanan pangan		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya Pembinaan Desa		
Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan			
Kesimpulan		Hasil pengujian, perumusan RKPD telah sesuai dengan Visi misi, arah kebijakan, dan program kepala daerah dalam RPJMD.	

11. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Perumusan Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah telah mengacu pada prioritas dan sasaran dalam RPJMD

12. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahunan telah berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah

Informasi ringkasan RKPD

- Kesimpulan :Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahunan telah berpedoman pada Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah telah sesuai dengan aturan.

Sesuai dengan Kebijakan Nasional bahwa Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahunan telah berpedoman pada Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah perlu ditambah/ disesuaikan berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

13. Perumusan rencana kerja dan pendanaa daerah

Kesimpulan : RKPD telah memuat Perumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

14. Pelaksanaan forum konsultasi publik

Pelaksanaan forum konsultasi publik dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2020, sesuai dengan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.

15. Penyelarasan rencana kerja dan pendanaa daerah

Kesimpulan :

- RKPD Telah sesuai/selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, RPJPD Kabupaten Tanah Laut dan RPJMD Kabupaten Tanah Laut
- Dalam Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 untuk Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal masih ada yang kosong

Belanja Barang dan jasa	372.006.653.900,00
• Belanja Barang dan jasa BLUD, BOS	27,787,173,864.00
• Belanja Gaji PTT, Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	
• Belanja Barang dan jasa Bantuan Pndanaan Kelurahan dari APBN dan APBD	

Informasi ringkasan RKPD

• Belanja Barang dan jasa	
Belanja Modal	206,234,253,586
Belanja Modal	202.773.150.750,00
• Belanja Modal Dana BOS	3,461,102,836.00
• Belanja Modal Bantuan Pendanaan Kelurahan dari APBN dan APBD	
• Belanja Modal Lainnya	

16. Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah

Dalam perumusan rancangan akhir RKPD telah disusun sesuai dengan tahapan, tatacara dan Sistematika penyusunan dokumen RKPD

17. Perumusan rencana kerja dan pendanaan daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional

Rencana kerja dan pendanaan daerah telah memperhitungkan capaian sasaran pembangunan tahunan nasional, hal ini di tandai dengan adanya perumusan proyeksi pendapatan, biaya dan pembiayaan daerah

18. Rencana kerja dan pendanaan daerah telah memperhitungkan prakiraan maju

Rencana kerja dan pendanaan daerah sebagian besar belum memperhitungkan prakiraan maju. Hal ini dapat dilihat pada bab v tabel rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2021 Kabupaten tanah laut.

19. Musrenbang RKPD yang bertujuan:

a. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

b. Menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah

Musrenbang RKPD telah bertujuan mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan dan menyepakati sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan daerah. Hal ini dapat dilihat pada berita acara musrenbang RKPD tanggal 26 Maret 2020

20. RKPD telah mencantumkan Kebijakan Penganan Covid 19

Perumusan RKPD **belum** memuat kebijakan terkait penanganan covid 19 sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2021 Pasal 2 ayat 2 huruf d:

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKP Tahun 2021 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2021 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Informasi ringkasan RKP

- D. Data dan informasi yang disajikan dalam rangka memotret kondisi capaian kinerja tahun sebelumnya, agar disajikan menggunakan data yang valid, update, akurat, *time series* dan dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data merupakan rujukan yang sangat penting di dalam menentukan isu strategis dan strategi arah kebijakan sehingga perlu untuk dilengkapi. Data-data yang perlu dilengkapi antara lain :
- i). Data Capaian Indikator Kinerja Daerah;
 - ii). Data (time series 5 tahun) tentang Jumlah penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan
 - iii). Data jumlah penduduk yang telah mengikuti Program Kejar Paket A, B, dan C;
 - iv). Data jumlah bencana pada wilayah rawan tahun 2015-2018, untuk mendukung permasalahan potensi tinggi terjadinya bencana;
 - v). Data Tingkat Pengangguran Terbuka, agar diperbaiki dan ditampilkan data time series dari tahun 2015-2019
 - vi). Data jumlah pengangguran pada bulan Apr-2020, untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap permasalahan peningkatan jumlah pengangguran;
 - vii). Data jumlah UMKM dan IKM;
 - viii). Data ketersediaan pangan utama, prosentase Usaha Mikro dan Kecil, jumlah UMKM dan tenaga kerja, baik yang dirumahkan maupun yang di-PHK tahun 2020 yang terdampak oleh pandemi Covid-19;
 - ix). Data jumlah trayek kendaraan umum yang masih beroperasi pada periode 5 tahun terakhir;
 - x). Data portal website yang dimiliki Pemkab Tanah Laut, dalam rangka mendukung peningkatan penyebaran informasi penyelenggaraan pembangunan kepada masyarakat;
 - xi). Data realiasi capaian target tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), dalam rangka mendukung identifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan;
 - xii). Data capaian SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
 - xiii). Data IKLH dan RTH
 - xiv). Data yang belum menggambarkan perkembangan selama 4-5 tahun, seperti :
 - Tingkat Pengangguran terbuka, (terkait sasaran kab tala 2021 menumbuhkan lapangan kerja baru dengan peningkatan pelatihan pemberdayaan berbasis vokasi)
 - Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan lapangan usaha,
 - Jumlah dan nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut,
 - Jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap perairan umum
 - Produksi perikanan budidaya
 - Jumlah rumah tangga perikanan
 - Jumlah Wisatawan Asing dan Wisatawan Domestik (terkait sasaran memaksimalkan potensi wisata)
 - Luas lahan sawah
 - Luas lahan tegal/kebun/lading
 - Jumlah pedagang

Informasi ringkasan RKPD

- E. Agar memperhatikan antara data - permasalahan - isu strategis - tema - pritas pembangunan. Sebagai contoh, salah satu prioritas adalah Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Perlindungan Sosial dengan sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat, prioritas ini dipilih untuk menyelesaikan permasalahan belum optimalnya produktivitas tenaga kerja, kurangnya pemberdayaan UMKM, lemahnya motivasi usaha dan jiwa kewirausahaan, kemampuan dan kapasitas pengrajin pelaku usaha industry relative masih rendah, dstnya. Selain itu terkait dengan covid-19 disinyalir jumlah UMKM menurun dan jumlah pengangguran meningkat. Namun penjelasan dan data-data terkait hal ini masih sangat kurang. Kelengkapan data akan menjadi pendukung program/kegiatan yang telah dialokasikan serta sasaran program kegiatan yang ingin dicapai ;
- F. Lengkapi indikator dan target yang belum dicantumkan pada Bab IV dan Bab VI. Target yang ditetapkan di dalam RKPD agar mempertimbangkan kondisi aktual akibat pandemi COVID dan hasil rapat koordinasi Bappeda se Kalimantan Selatan pada tanggal 28 - 29 Mei 2020 terkait indikator makro daerah;
- G. Penyusunan rencana program kegiatan tahun 2021, agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- i. Memastikan bahwa *mandatory budget* di bidang pendidikan dan Kesehatan telah terpenuhi;
 - ii. Dukungan pendanaan untuk perkuatan sistem kesehatan, hilirisasi industri, perdagangan, koperasi, UKM, UMKM dan IKM dalam rangka pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi Covid- 19;
 - iii. Strategi percepatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum terkait Cakupan Air Minum Layak yang hanya 33 pada tahun 2019 dan Sanitasi Layak hanya 33% pada tahun 2018
 - iv. Dukungan terhadap kegiatan terkait GeoPark, karena beberapa GeoSite berada di wilayah kabupaten Tanah Laut, sehingga akan mendukung dan selaras dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi Kalimantan Selatan;
 - v. Dukungan terhadap peningkatan capaian IKLH melalui program kegiatan Ruang Terbuka Hijau;
 - vi. Dukungan kebijakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melalui:
 - Kegiatan pelaksanaan percepatan perencanaan yang responsif gender, khususnya untuk tim driver PPRG;
 - Pemberdayaan organisasi unit kerja perlindungan perempuan dan anak di kab Tanah Laut;
 - Kegiatan terkait koordinasi pelaksanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- H. Pelayanan di dalam panti merupakan kewenangan provinsi, bukan kewenangan Kabupaten, sehingga Program Pemberdayaan Panti Asuhan/ Panti Jompo dengan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Panti Asuhan, perlu diformulasi kembali agar sesuai dengan kewenangan Kabupaten;
- I. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 sebesar 7,64 tahun, atau lebih rendah dari rata-rata Provinsi 8,2 tahun. Masih rendahnya ARLS karena fasilitas Pendidikan yang memadai masih kurang, maka di halaman 58-60 agar diperjelas dengan data fasilitas Pendidikan dan tenaga pendidik di jenjang sekolah dasar dan SMP/Mts. Secara umum penduduk Kalimantan Selatan banyak menyekolahkan anaknya di Pesantren. Agar memperhatikan dan mendorong pesantren-pesantren tradisional untuk mengikutsertakan santrinya mengikuti program Kejar Paket;

Informasi ringkasan RKPD

3. Mepedomani Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 Pasal 2, Pasal 10 dan Pasal 12, hasil pemetaan program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kab Tanah Laut Tahun 2021;
4. Mengacu surat Menteri dalam negeri Nomor 050/3297/SJ tanggal 29 Mei 2020 hal Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta dalam rangka percepatan sinkronisasi dan transparansi perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar segera menyelesaikan tahapan integrasi RKPD ke dalam SIPD;
5. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar segera melakukan proses penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, dan selanjutnya segera menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;
6. Peraturan Bupati Tanah Laut tentang RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dijadikan landasan untuk penyusunan KUA-PPAS Tahun 2021, termasuk perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dengan memastikan semua hasil (*outcome*) dalam RKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 tidak mengalami perubahan, sepanjang tidak terjadi perubahan mendasar/darurat, perubahan kebijakan nasional dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
Kepala BAPPEDA
Provinsi Kalimantan Selatan,



Ir. F. Nurul Fajar Desira, CES
Pembina Utama Madya
NIP. 19641203 199003 1 012

Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
2. Gubernur Kalimantan Selatan (sebagai laporan)